

**TATA KELOLA SISTEM INFORMASI GAMPONG (SIGAP) DALAM
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN DARUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SAIDIL AKBAR

NIM. 220802087

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN
2026**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama : Saidil Akbar
NIM : 220802087
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tanggal Lahir : Baroh Musa, 09 April 2004
Alamat : Jln Lam Ara II, Rukoh, Kec. Syiah Kuala

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

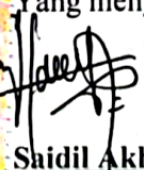
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ilmiah ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2026

Yang menyatakan,




Saidil Akbar
NIM 220802087

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

TATA KELOLA SISTEM INFORMASI GAMPONG (SIGAP) DALAM PEMERINTAHAN DI KECAMATAN DARUSSALAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

Oleh:

Saidil Akbar

NIM: 220802087

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

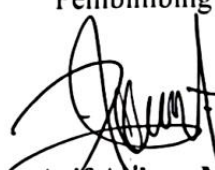
A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


REZA IDRIA, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

Pembimbing II


Arif Akbar, M.A
NIP. 199110242022031001

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI GAMPONG (SIGAP) DALAM
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN DARUSSALAM**

Saidil Akbar
NIM. 220802087

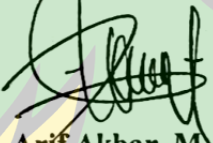
Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Agustus 2026
Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Reza Idria, S.H.K., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

Sekretaris


Arif Akbar, M.A
NIP. 199110242022031001

Penguji I


Zakki Fuad Khalil S.IP., M.Si.
NIP. 198611122015031005

Penguji II


Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIP. 197911172023212012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Muji Mulia, M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dapat mendukung tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar, khususnya di Kecamatan Darussalam. SIGAP merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas administrasi dan pelayanan publik di tingkat gampong. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital aparatur desa, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pemerintah kecamatan darussalam dan aparat gampong. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi aparatur gampong, peningkatan fasilitas teknologi dan jaringan internet, aktivasi dashboard publik untuk memperkuat transparansi, serta sosialisasi intensif kepada masyarakat agar SIGAP dapat berfungsi maksimal sebagai instrumen *e-government* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan gampong yang baik (*good governance*).

Kata Kunci: SIGAP, Tata Kelola Pemerintahan, *E-Government*

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Teori <i>Good Governance</i>	11
1. Partisipasi Masyarakat	13
2. Transparansi.....	14
3. Responsivitas	14
4. Efektivitas dan Efisiensi	15
5. Akuntabilitas	16
6. Visi Strategis.....	17
2.1.1 Penelitian Terdahulu	18
2.1.2 Perbedaan Penelitian dan Persamaan Penelitian.....	26
2.2. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
3.1. Lokasi Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3. Jenis Penelitian	30
3.4. Metode Pengumpulan Data	31
3.5. Informan Penelitian	32
3.6. Sumber Data.....	33
3.7. Teknik Analisis Data	34
3.8. Jadwal Penelitian.....	34

BAB IV	36
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam	36
4.2. Pengertian SIGAP	37
4.3. Hasil Penelitian	44
4.3.1. Partisipasi Masyarakat.....	44
4.3.2. Transparansi	46
4.3.3. Responsivitas.....	49
4.3.4. Efektivitas dan Efesiensi	52
4.3.5. Akuntabilitas	54
4.3.6. Visi Strategis	56
4.4. Pembahasan Penelitian.....	59
4.5. Faktor Kendala Dari Pemanfaatan SIGAP Dan Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Gampong.	65
BAB V	69
PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gampong merupakan suatu wilayah yang berfungsi sebagai lembaga pemerintahan otonom terendah dalam struktur pemerintahan di Aceh, Indonesia. Gampong berada di bawah tingkat mukim dan dipimpin oleh seorang Keuchik atau sebutan lain yang memiliki wewenang untuk mengurus urusan domestik sendiri menurut tradisi dan adat yang berlaku serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Menurut undang-undang yang diatur dalam Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, gampong merupakan suatu komunitas hukum yang memiliki struktur pemerintahan mandiri dan mengelola kepentingan warga di wilayahnya secara otonom. Tugas gampong mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, melaksanakan syariat Islam, serta menyelesaikan konflik di tingkat komunitas. Keberadaan gampong sebagai entitas otonom sangat dipengaruhi oleh kewenangan, struktur organisasi, dan ketersediaan dana yang cukup. Oleh sebab itu, gampong memiliki peranan krusial dalam merefleksikan keinginan masyarakat setempat dan melaksanakan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.²

Sistem informasi layanan digital merupakan sebuah sistem yang menggabungkan teknologi informasi dengan proses organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, memproses,

¹ Dedy Syahputra, Faisal A. Rani, and Mohd. Daud Yoesoef, "Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 29. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/550585>.

² Aris Munandar et al., "Pembentukan Qanun Gampong Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong (Studi Kasus Gampong Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara)" 8, no. 2 (2025).

dan mendistribusikan informasi yang berhubungan dengan layanan digital agar layanan tersebut dapat disampaikan dengan cara yang efisien, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna.³ Sistem ini terdiri dari elemen-elemen seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan tenaga kerja yang saling berkolaborasi untuk menunjang layanan digital, contohnya layanan publik atau bisnis yang berbasis digital.⁴

Perangkat lunak atau sistem yang dibuat khusus untuk pengelolaan data dan administrasi pemerintahan di tingkat gampong (desa adat) di Provinsi Aceh dikenal sebagai Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong (SIGAP) (diundangkan 24 Juni 2021) adalah landasan hukum untuk menciptakan sistem informasi terintegrasi. SIGAP bertujuan menyatukan data, meningkatkan transparansi, serta mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat gampong (desa). Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik di tingkat desa. Sistem ini menyederhanakan akses informasi dan layanan publik dengan memasukkan pengelolaan data kependudukan serta prosedur administratif lainnya yang diperlukan masyarakat.⁵

Masyarakat bisa menikmati layanan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) melalui aplikasi berbasis web yang menyimpan data serta informasi penting mengenai gampong mereka, seperti data penduduk, potensi yang ada di gampong, dan informasi tentang perkembangan pembangunan serta pelayanan publik. Aplikasi ini mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi yang

³ Arief Setyawan, Achluddin Ibnu Rochim, and Bambang Kusbadrijo, "Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, no. 05 (2022): 42–51. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/538>

⁴ Hanifa Zahra, Seno Santoso, and Irvan Arif Kurniawan, "Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi Simpel TKR PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan* 7, no. September (2024): 87–98. <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/247>

⁵ Sistem Informasi Gampong, "Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Versi 1.7.5 2020," 2020.

jelas dan tepat tanpa perlu mengunjungi kantor gampong secara langsung, termasuk dalam proses administrasi surat menyurat dan layanan terkait kependudukan.⁶

Selain sebagai alat manajemen data, Sistem Informasi Gampong juga menyediakan pelatihan bagi aparat kampung untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem. Hasilnya, sistem ini mendorong pergeseran desa menuju paradigma desa pintar, yang menekankan digitalisasi dan manajemen yang lebih efektif dan efisien di tingkat desa, selain membantu administrasi. Penerapan sistem ini mendukung percepatan layanan publik yang berbasis *e-government* serta pengembangan desa digital yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh menghasilkan sistem ini, yang juga dikenal sebagai SIGAP (Sistem Informasi Gampong), sebagai salah satu komponen program inovasi pemerintah daerah. Penggunaan sistem ini mendorong partisipasi publik yang lebih besar, mempercepat prosedur administratif, dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dan warganya.⁷ Implementasi SIGAP telah terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di beberapa desa.⁸ Secara umum, Sistem Informasi Gampong merupakan platform teknologi informasi yang menggabungkan berbagai fungsi administratif dan pelayanan di tingkat gampong untuk memfasilitasi pendekatan manajemen pemerintahan yang lebih modern, terbuka, dan berorientasi pelayanan.

Qanun yang relevan dengan sistem informasi gampong di Aceh mencakup Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Sistem Informasi Aceh Terpadu. Qanun ini mengatur tata kelola data serta

⁶ Dina Hanifa et al., “Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Pada Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar,” *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 48–60, <https://doi.org/10.22373/jrpm.v4i1.3723>. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jrpm/article/view/3723>

⁷ “Penerapan Sistem Informasi Gampong Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh,” 2024.

⁸ Safrizal Razali et al., “Penerapan Sistem Informasi Desa E-Gampong Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik,” *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)* 7, no. 3 (2023): 131–38. <https://pdis-jatim.or.id/index.php/jatiemas/article/download/4/2>

pelaksanaan sistem informasi terpadu di seluruh Aceh, termasuk di tingkat gampong. Dalam qanun ini, setiap gampong memiliki tanggung jawab terhadap pengolahan data dan prosedur resmi dalam manajemen data. Selain itu, terdapat juga penerapan sistem informasi gampong bernama SIGAP, yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan keterbukaan dalam layanan administrasi gampong.⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong (SIGAP) menjadi payung hukum utama, mengatur fungsi, perangkat, muatan, pengembangan, koordinasi, penerapan, pembinaan, dan pengawasan SIGAP.¹⁰

Sistem Informasi Gampong (SIGAP) merupakan instrumen digitalisasi tata kelola desa di Aceh yang memanifestasikan prinsip-prinsip teori *Good Governance* dalam ranah administrasi pemerintahan tingkat akar rumput. Teori *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) adalah paradigma administrasi publik yang menekankan pada pengelolaan sumber daya publik serta proses pengambilan keputusan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan melalui kolaborasi antara tiga sektor utama: negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat sipil (*civil society*). Tujuan utama dari penerapan *good governance* adalah mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap birokrasi.

Sistem Informasi Gampong yang telah dikembangkan untuk memperbaiki efisiensi administrasi, menjaga transparansi, dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa, sering kali tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Salah satu faktor paling signifikan adalah minimnya pemahaman aparatur gampong tentang cara menggunakan sistem tersebut¹¹. Keterbatasan dalam pelatihan, pendampingan, dan kemampuan digital membuat aparat desa sulit mengoperasikan

⁹ Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu,” 2020.

¹⁰ Sistem Informasi Gampong et al., “Gubernur Aceh,” 2021, 2–10.

¹¹ Hanifa et al., “Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Pada Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.”

sistem, sehingga mereka kembali bergantung pada cara manual atau dokumen fisik. Namun SIGAP yang jarang aktif dapat berakibatkan penggunaan sistem ini, data yang tersimpan di dalamnya menjadi tidak tepat, tidak diupdate secara berkala, dan tidak mencerminkan situasi nyata di lapangan. Hal ini berpengaruh pada pengambilan keputusan yang berdasarkan data, pengawasan program.

Meskipun SIGAP adalah sistem informasi yang dikelola di tingkat desa, keberadaannya secara tidak langsung dan strategis membantu pengelolaan pemerintahan di tingkat kecamatan. SIGAP menyajikan informasi mengenai gampong, mencakup populasi, keuangan, pembangunan, dan layanan publik dalam format digital.¹² Data ini berfungsi sebagai referensi utama bagi kecamatan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja gampong. Dengan kata lain, SIGAP memudahkan kecamatan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan cepat, sehingga memperkuat peran koordinatif mereka. Melalui SIGAP, informasi mengenai aktivitas pemerintahan dan keuangan gampong dapat diakses secara transparan. Ini membantu kecamatan dalam meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan di daerah mereka, karena data dari semua gampong dapat diawasi secara langsung dan terintegrasi. Kecamatan membutuhkan informasi dari gampong untuk merencanakan pembangunan daerah, seperti dalam Musrenbang Kecamatan.¹³

SIGAP menyajikan data yang berbasis realitas dari tingkat bawah, sehingga keputusan di tingkat kecamatan menjadi lebih tepat dan efektif serta berfokus pada kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan keberadaan SIGAP, proses pelaporan, administrasi, dan komunikasi antara

¹² Setyawan, Rochim, and Kusbadrijo, "Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur."

¹³ Desak Ayu Made Citta Dhirya and I Gede Ketut Warmika, "Analisis Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong (Dpmg) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong," *Tjyybjb.Ac.Cn* 27, no. 2 (2021): 58–66.

gampong dan kecamatan menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Ini mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan. Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengawasi gampong. Dengan bantuan SIGAP, kecamatan dapat memantau kinerja gampong secara langsung, termasuk penggunaan dana desa, pelaksanaan proyek, dan layanan publik. Dengan cara ini, pengawasan bisa menjadi lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Sistem Informasi Gampong (SIGAP) awalnya diciptakan untuk mendukung pengelolaan pemerintahan di tingkat gampong, tetapi sekarang juga telah dapat diakses di level kecamatan. Adanya SIGAP di kecamatan berperan sebagai alat untuk koordinasi, pemantauan, dan pembinaan dalam pelaksanaan pemerintahan gampong di area tersebut. Dengan menggunakan SIGAP, pihak kecamatan bisa memantau data terkait administrasi, keuangan, pembangunan, serta layanan publik di setiap gampong secara langsung. Oleh karena itu, SIGAP di tingkat kecamatan memperkuat integrasi sistem informasi antar tingkatan pemerintahan, meningkatkan keterbukaan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan berdasarkan data.¹⁵

PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada dasarnya mengatur kedudukan kecamatan, pembentukan dan penataan kecamatan, tugas camat, serta pengaturan kelurahan. Kecamatan dipahami sebagai bagian wilayah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, dan camat menjalankan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. PP ini juga menegaskan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat dasar, syarat teknis, dan syarat administratif, baik melalui pemekaran maupun penggabungan wilayah. Selain

¹⁴ Gampong, "Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Versi 1.7.5 2020."

¹⁵ Sudarman Puteh Emi Riza, Wardana, Dicky Ariesandi, Zainal Mahyar, "Panduan Penggunaan Sistem Informasi Gampong," 2021, 1–50.

itu, camat dapat menerima pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, terutama untuk pelayanan tertentu agar urusan pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat. Aturan ini juga memuat ketentuan mengenai kelurahan, termasuk penataan dan dukungan pelaksanaannya.¹⁶ Kecamatan Darussalam merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Wilayah ini memiliki fungsi signifikan sebagai daerah administrasi yang terdiri dari beberapa desa yang dikenal dengan sebutan gampong.¹⁷ Gampong-gampong ini adalah unit pemerintahan terkecil dan pusat kegiatan masyarakat lokal, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi.¹⁸ Terdapat sekitar 29 desa atau gampong di Kecamatan Darussalam. Jumlah penduduk di Kecamatan Darussalam Aceh Besar pada tahun 2023 tercatat sebanyak 25.853 jiwa menurut data resmi "Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2024" yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. Masing-masing desa memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, mulai dari tradisi budaya yang masih kuat, kegiatan pertanian, hingga perdagangan kecil yang menjadi sumber penghidupan bagi penduduknya.¹⁹

Kecamatan Darussalam, yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, telah mengimplementasikan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi desa. SIGAP terhubung dengan informasi dari kecamatan dan kabupaten, sehingga warga yang mengajukan permintaan yang memerlukan persetujuan atau tanda tangan pimpinan (seperti rekomendasi proposal bantuan sosial, izin keramaian, dan lain-lain) tetap mendapatkan layanan langsung di kantor kecamatan,

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan," 2021, 45, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77921/pp-no-17-tahun-2018>.

¹⁷ bps And Aceh Besar, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar Bps-Statistics Aceh Besar Regency," 2024.

¹⁸ Sufri Helmi, Noer Fadhly, and Yusria Darma, "Bangkitan Perjalanan Rumah Tangga Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan* 2, no. 1 (2019): 68–77, <https://doi.org/10.24815/jarsp.v2i1.13206>.

¹⁹ Pemkab Aceh and Besar, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar," *Kecamatan Baitussalam Dalam Angka*, 2021.

meskipun datanya telah diambil dari SIGAP. Karena SIGAP merupakan aplikasi yang berjalan di web dan terhubung dengan internet serta mengelola data publik dan administrasi gampong/kampung, SIGAP dapat mengalami gangguan yang bersifat siber. SIGAP berfungsi sebagai sistem informasi berbasis web yang menerima data masukan, melakukan autentikasi pengguna, serta mengirimkan atau menampilkan informasi mengenai desa, yang menjadikannya rentan terhadap serangan seperti *(SQL) injection*, *brute force* pada *login*, atau *phishing* yang menargetkan akun operator gampong. Di Kecamatan Darussalam, Permasalahan utama dalam pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) terletak pada kesiapan dan kemampuan pemerintah gampong sebagai pelaksana utama sistem. Meskipun SIGAP telah disediakan sebagai sarana untuk mendukung pengelolaan data, administrasi, pelayanan, dan keterbukaan informasi, pemanfaatannya belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemahaman aparatur gampong dalam mengoperasikan SIGAP, kurangnya pelatihan dan pendampingan, serta keterbatasan fasilitas dan jaringan internet yang mendukung penggunaan sistem.

Kondisi tersebut menyebabkan SIGAP belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Ketika aparatur gampong belum mampu mengelola dan memperbarui data secara optimal, informasi yang tersedia dalam sistem berpotensi tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi terbaru. Permasalahan pada tingkat pemerintah gampong tersebut pada akhirnya turut memengaruhi kemampuan pemerintah kecamatan dalam memperoleh informasi yang akurat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan evaluasi terhadap gampong.

Saat ini, masih terdapat masyarakat yang belum memahami atau mengetahui cara untuk mengakses Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Minimnya sosialisasi serta pelatihan menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memanfaatkan sistem dengan baik. Akibatnya, potensi

kemudahan layanan dan transparansi yang disediakan oleh sistem belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penggunaan layanan digital yang tersedia.

1.2. Identifikasi Masalah

2. Belum adanya kesiapan dan kemampuan pemerintah gampong sebagai pelaksana utama sistem informasi gampong (SIGAP)
3. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah mengenai penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) kepada masyarakat dan aparatur gampong menyebabkan pemanfaatan SIGAP belum berjalan secara optimal.

1.3. Rumusan Masalah

1. Apa kendala dari pemanfaatan SIGAP dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan administrasi gampong?
2. Bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kecamatan Darussalam?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kecamatan Darussalam.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan dan pengoperasian SIGAP.

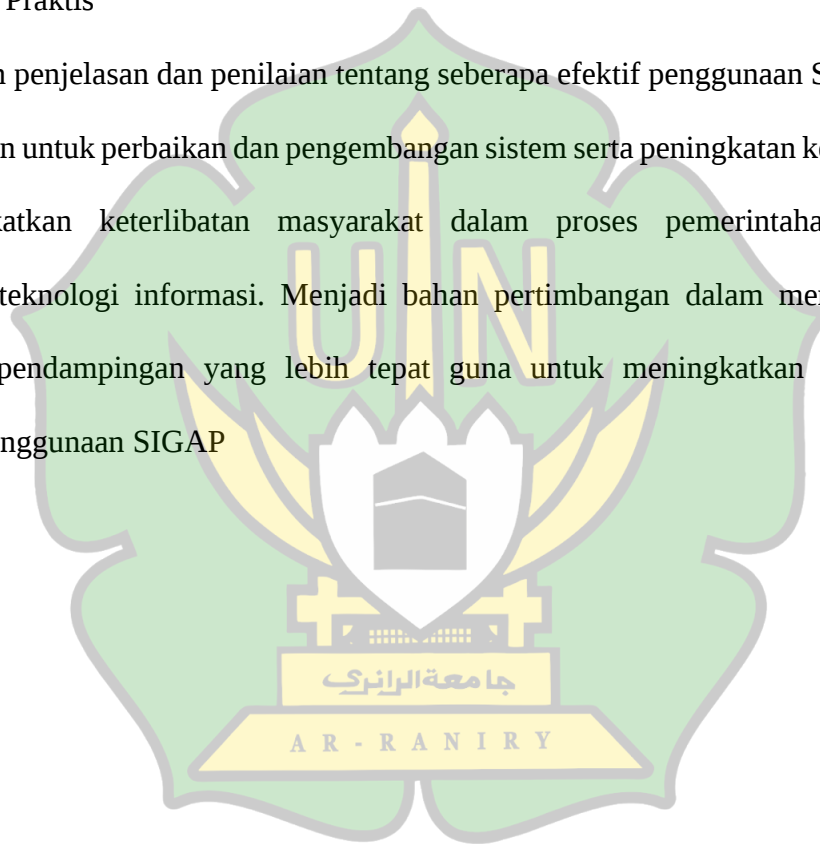
1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan suatu kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang teknologi informasi pemerintahan gampong dan sistem informasi layanan publik di tingkat gampong. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan digitalisasi layanan publik dan transformasi desa menuju desa pintar.

2. Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan dan penilaian tentang seberapa efektif penggunaan SIGAP agar dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan pengembangan sistem serta peningkatan kemampuan aparat desa. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pelatihan dan pendampingan yang lebih tepat guna untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan penggunaan SIGAP



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori *Good Governance*

Teori *Good Governance* adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan cara pemerintah mengatur dan melaksanakan kebijakan dengan benar, yang mencakup pengambilan keputusan yang bertujuan menciptakan sebuah lingkungan yang efektif, jujur, melibatkan masyarakat, bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan.²⁰ Prinsip ini menempatkan kepentingan masyarakat sebagai fokus utama dalam seluruh kegiatan pemerintah, sehingga setiap kebijakan atau tindakan yang diambil harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir individu atau kelompok. Selama pelaksanaannya, tata kelola yang baik mengharuskan adanya transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, yang memungkinkan mereka terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi mereka.²¹

Teori *Good Governance* muncul pada akhir 1980-an, terutama setelah munculnya masalah pemerintahan dan ekonomi di berbagai negara berkembang. Konsep ini pertama kali diungkapkan secara resmi oleh Bank Dunia pada akhir tahun 1980-an.²² Pada waktu itu, organisasi internasional seperti Bank Dunia dan UNDP mulai menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada baik buruknya tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik juga memerlukan kepemimpinan yang efisien, di mana pemimpin harus membuat

²⁰ Joko Setyono, “(Pendekatan Ushul Fikih : Teori Peningkatan Norma),” *Journal Of Islamic Economics and Banking* 6, no. 1 (2021): 25–40.

²¹ Suparji Suparji, “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756>.

²² Rahul Tripathi, “Good Governance: Origin, Importance and Development in India,” *International Journal of Development Research* 07, no. 11 (2021): 16968–70.

keputusan tidak hanya berdasar pada kepentingan strategis, tetapi juga harus bertindak adil dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.²³ Aspek keadilan dan kepastian hukum sangatlah penting, di mana sistem hukum harus berlaku sama untuk semua orang, menjamin perlindungan hak-hak individu dan mengutamakan supremasi hukum. Keterbukaan dan tanggung jawab menjadi dasar yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengelolaan sumber daya pemerintah dapat dipertanggungjawabkan baik dalam prosesnya maupun hasilnya. Hal ini sangat penting untuk mencegah munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.²⁴

Pengembangan *Good Governance* di Indonesia tidak dapat terpisahkan dari kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga komponen ini harus berfungsi secara bersama-sama dalam mengelola pembangunan serta sumber daya negara agar dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah bertugas sebagai pengelola negara yang menetapkan aturan dan melakukan pengawasan, sektor swasta berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi, dan masyarakat sebagai pengawas serta penyedia masukan. Kerja sama yang seimbang di antara ketiganya menjadi kekuatan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berintegritas.²⁵ Secara umum, *Good Governance* menekankan bahwa pemerintahan yang efektif tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga mengenai cara kekuasaan tersebut dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan tata kelola yang baik berarti membangun suatu sistem yang mampu melindungi hak-hak warga, memberikan kesempatan partisipasi yang luas, serta memastikan adanya transparansi

²³ Thomas G. Weiss, "Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges," *International Organization* 21, no. 5 (2021): 389–408, <https://doi.org/10.4324/9781315251981-14>.

²⁴ Ana Rita Garcia et al., "Urgensi Penerapan Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Baik (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan) *The Urgence Of Implementation Of Good Governance In Achieving Quality Of Good Public Service*," n.d.

²⁵ Ainyna Rachmadianty Azan Engkus and Anisa Tiara Fitri, Alliadzar Hanif, "Buku Mewujudkan GG Melalui Pelayanan Publik," *Dialektika* 19, no. 1 (2021): 1–361.

dan akuntabilitas di setiap aspek pemerintahan. Di Indonesia, berbagai upaya untuk menerapkan *Good Governance* terus dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan demi masa depan negara yang lebih baik dan demokratis.²⁶ Berikut beberapa indikator dari teori *Good Governance*

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan langsung warga dalam proses suatu kegiatan, program, pembangunan, atau proses pengambilan keputusan publik. Dalam kerangka pemerintahan yang baik, peran serta ini menjadi salah satu dasar penting yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui partisipasi ini, masyarakat mendapatkan kesempatan dan ruang untuk memberikan masukan, kritik, dan pandangan dalam merancang serta menerapkan kebijakan publik, sehingga kebijakan itu dapat menjadi lebih terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan peka terhadap kebutuhan mereka.

Prinsip partisipasi masyarakat dalam *good governance* mengharuskan adanya partisipasi masyarakat yang konstruktif, bukan sekadar sebagai formalitas, tetapi sebagai kontribusi yang memiliki dampak nyata terhadap hasil kebijakan. Ini mencakup sistem transparansi informasi, kemudahan akses bagi masyarakat untuk terlibat, serta tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kemampuan pejabat serta mutu layanan publik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam *good governance* bukan hanya berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dengan keterlibatan yang nyata dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata.²⁷

²⁶ Neneng Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VI, no. 1 (2021): 1–18.

²⁷ Noer Bunka Rahmawati and Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, "Peran Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis," *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 313–23, <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302>.

2. Transparansi

Transparansi merupakan kondisi yang jelas, nyata, dan terbuka, di mana tidak ada tujuan yang tersembunyi dan informasi yang penting disediakan sepenuhnya untuk semua pihak yang berkepentingan. Secara umum, transparansi merujuk pada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, penyampaian informasi, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya, terutama dalam konteks pemerintahan, organisasi, dan lembaga publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses, mengawasi, dan memahami kebijakan, tindakan, dan laporan dari organisasi atau pemerintah dengan cara yang bertanggung jawab. Dengan adanya transparansi, sebuah lembaga atau pemerintah dapat dipercaya karena setiap langkah dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik secara terbuka.²⁸

3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan suatu lembaga, organisasi, atau instansi publik untuk memahami kebutuhan masyarakat, merancang agenda dan prioritas pelayanan, serta menciptakan program pelayanan baru yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Responsivitas menunjukkan kemampuan dan kesiapan penyedia layanan untuk memberikan bantuan serta pelayanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal waktu, aksesibilitas, dan komunikasi. Selain itu, responsivitas juga mencerminkan kesesuaian antara program layanan dengan keinginan masyarakat dan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja pelayanan publik. Indikator responsivitas mencakup sikap dan komunikasi yang baik, serta

²⁸ . Akhmad, “Analisa Komprehensif Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Ad’ministrare* 3, no. 2 (2021): 31, <https://doi.org/10.26858/ja.v3i2.2425>.

pelayanan yang cepat, tepat, dan teliti dari petugas atau aparatur. Semua elemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan layanan yang mereka terima.²⁹

4. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tindakan atau upaya dapat berhasil mencapai sasaran atau hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, sebuah aktivitas dianggap efektif jika dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, seperti menyelesaikan tugas dengan hasil yang akurat sesuai dengan tujuan. Efektivitas lebih fokus pada "apakah tujuan telah berhasil dicapai" dengan baik.

Di sisi lain, efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya dengan cara yang optimal dalam mencapai hasil tersebut. Efisiensi berarti melaksanakan pekerjaan dengan metode yang benar sehingga tidak menghabiskan sumber daya secara berlebihan dan menghasilkan output maksimal dengan input yang minimal. Fokus efisiensi adalah pada penghematan dan ketepatan dalam pelaksanaan sebuah proses.

Efektivitas memastikan bahwa sasaran tercapai, sementara efisiensi memastikan pencapaian sasaran tersebut dengan penggunaan sumber daya yang paling hemat dan teliti. Dalam praktiknya, organisasi atau individu sebaiknya memadukan keduanya berperilaku efektif untuk mencapai target dan efisien dalam penggunaan sumber daya agar tidak mengalami pemborosan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan berhasil menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pasar (efektif), tetapi proses pembuatannya juga hemat biaya dan waktu (efisien), maka perusahaan tersebut beroperasi dengan baik secara keseluruhan. Namun, sebuah aktivitas bisa saja efektif

²⁹ Hasdinawati and Abd. wahid, "Responsivitas Pelayanan Publik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, no. 2 (2022): 81–96, <https://doi.org/10.59050/jian.v19i2.158>.

tanpa efisiensi, seperti mencapai tujuan tetapi dengan pengeluaran biaya dan waktu yang besar, atau efisien tanpa efektif, yakni menyelesaikan tugas secara hemat tetapi hasilnya tidak sesuai dengan sasaran.³⁰

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep yang mengacu pada kewajiban untuk memberikan penjelasan atas kinerja dan perilaku individu, kelompok, atau organisasi kepada pihak yang memiliki otoritas atau pemberi mandat. Secara luas, istilah ini berasal dari bahasa Inggris "*accountability*". Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menjelaskan, melaporkan, dan mengomunikasikan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut para pakar, akuntabilitas juga melibatkan aspek pengawasan sehingga kekuasaan tidak terpusat, serta mendorong transparansi dan integritas dalam pelaksanaan tugas. Dalam sektor publik, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme krusial untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilaksanakan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, kualitas keputusan dan pelayanan bisa lebih baik karena setiap tindakan, keputusan, dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan. Prinsip dasar akuntabilitas meliputi transparansi, tanggung jawab, integritas, dan keadilan.³¹

³⁰ Heryanto Monoarfa, "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2021): 1–9.

³¹ Muh Fikri Haikal and Deasy Mauliana, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Makassar)," *Jurnal Administrasi Negara* 28, no. April (2022): 89–112.

6. Visi Strategis

Visi Strategis adalah suatu konsep menyeluruh yang menjelaskan arah jangka panjang dan tujuan dari sebuah organisasi, serta cara untuk mencapainya. Ini berfungsi sebagai pedoman utama yang memberikan orientasi strategis dan juga mendorong organisasi dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk merealisasikan visi tersebut. Visi strategis mencakup nilai-nilai, sasaran, dan harapan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan, serta berperan sebagai landasan dalam merumuskan strategi dan membuat keputusan. Dalam konteks perencanaan strategis, visi ini membantu menyatukan semua anggota organisasi menuju tujuan yang sama dengan menjelaskan ambisi dan perkembangan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, sebuah visi strategis dapat dinyatakan sebagai "Menciptakan aparatur pemerintahan yang beretika, profesional, dan disiplin," yang memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan tersebut secara berkelanjutan dan terukur. Secara singkat, visi strategis berfungsi sebagai dasar utama dalam perencanaan dan pengembangan organisasi yang memberikan fokus dan motivasi dalam perjalanan mencapai tujuan jangka panjang.³²

³² M Setiawan Kusmulyono and Teguh Endaryono, "Kekuatan Visi Misi Dalam Memandu Arah Strategis UMKM Lebon," *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat PKN STAN 01* (2021): 138–43.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

NO.	Judul, Pengarang, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kelebihan	Kekurangan
1.	Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa Berbasis Web untuk Meningkatkan Manajemen Administrasi Desa (Studi Kasus: Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara) Rafik, Khairul Umami, Silva Aulia Salsabila, Widya Afiliani, Alifa Zairinadya, Yenni, Wira Santia, Siti Aminah, Aswin Nasution (2023). ³³	Pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Desa berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi di Desa Telaga Bakti, Kecamatan	Menggunakan metode Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall , serta dikombinasikan dengan metode penyuluhan (sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan masyarakat desa).	Menghasilkan aplikasi Sistem Informasi Desa berbasis web yang memudahkan perangkat desa dan masyarakat dalam pelayanan administrasi seperti pengajuan surat, pencetakan dokumen, dan penyampaian informasi secara daring.	- Meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan administrasi desa. - Memudahkan masyarakat mengakses layanan secara online tanpa harus ke kantor desa. - Aplikasi mudah dioperasikan	- Implementasi masih terbatas pada satu desa (Telaga Bakti) sehingga perlu uji coba di desa lain. -Ketergantungan pada koneksi internet dan kemampuan digital perangkat desa serta masyarakat. - Belum ada pengujian

³³ Rafik Rafik et al., "Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa Berbasis Web Untuk Meningkatkan Manajemen Administrasi Desa (Studi Kasus: Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara)," *Teknodimas: Teknologi Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 5–13.

		Singkil Utara, Aceh Singkil.		Pengujian dengan Black Box Testing menunjukkan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai spesifikasi.	dan telah diuji secara fungsional dengan hasil sesuai harapan.	jangka panjang terkait keberlanjutan dan keamanan data.
2.	Pelatihan dan Pendampingan Sistem Informasi Administrasi dan Web Mobile untuk Aparatur Gampong Uteunkot Kota Lhokseumawe. Oleh Mutammimul Ula, Zahratul Fitri, Fakhrurrazi, Zul Akli, Zainal Abidin, dan	Penelitian ini berfokus pada peningkatan kemampuan aparatur gampong Uteunkot dalam memanfaatkan sistem informasi administrasi berbasis web	Menggunakan metode pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan tahapan analisis kebutuhan, survei, perencanaan pelatihan,	Pelatihan dan pendampingan ini berhasil meningkatkan pemahaman serta keterampilan aparatur gampong dalam penggunaan sistem informasi	Memberikan peningkatan kapasitas digital bagi aparatur gampong, mendorong penerapan teknologi informasi di tingkat desa, serta	Masih terdapat kendala pada infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan perangkat keras, serta rendahnya literasi digital dan dukungan masyarakat yang

	Mochamad Ari Saptari (2024). ³⁴	dan mobile untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan administrasi desa.	pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, serta evaluasi dan monitoring.	administrasi berbasis web. Sistem ini mampu mempercepat layanan publik, meningkatkan akurasi data, dan mendorong partisipasi masyarakat. Implementasi sistem juga berdampak positif terhadap efisiensi administrasi, transparansi, dan akuntabilitas	memperkuat transparansi dan efisiensi pelayanan publik.	menyebabkan implementasi sistem belum optimal.
--	---	---	--	--	---	--

³⁴ Mutammimul Ula et al., “PKM Pelatihan Dan Pendampingan Sistem Informasi Administrasi Dan Web Mobile Untuk Aparatur Gampong Uteunkot Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Malikussaleh Mengabdikan* 3, no. 2 (2024): 460–71.

				pemerintahan desa.		
3.	Desain dan Implementasi Aplikasi Chatbot Gampong Carong. Oleh Isnani, Salahuddin, Muhammad Arhami, dan Rachel Ardana Putra Ginting (2024). ³⁵	Penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi aplikasi “Gampong Carong”, yaitu sistem informasi desa berbasis chatbot yang mendukung penerapan <i>E-Government</i> di Gampong Nga, Aceh Utara. Tujuan penelitian ini	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tahapan pengumpulan data melalui wawancara bersama Geuchik dan masyarakat Gampong Nga untuk memperoleh kebutuhan sistem serta studi literatur	Penelitian menghasilkan aplikasi Gampong Carong berbasis chatbot yang dapat membantu masyarakat mengakses berbagai layanan dan informasi desa secara cepat dan efisien. Aplikasi ini berfungsi sebagai asisten virtual yang	Aplikasi ini menggunakan teknologi chatbot yang memudahkan interaksi masyarakat dengan pemerintah desa, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendukung konsep <i>E-Government</i> di tingkat desa.	Pengetahuan chatbot masih terbatas pada informasi yang dimasukkan secara manual dan belum dapat diperbarui secara otomatis. Selain itu, kemampuan chatbot dalam memahami bahasa alami masih perlu dikembangkan agar lebih

³⁵ Muhammad Arhami et al., “Disain Dan Implementasi Aplikasi Chatbot Gampong Carong,” *EProceeding of TIK* 4, no. 1 (2024): 4–9.

		adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempermudah masyarakat desa dalam mengakses berbagai informasi, seperti administrasi, kesehatan, pengaduan masyarakat, serta perkembangan desa.	terhadap buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Analisis dilakukan terhadap kebutuhan sistem baik fungsional maupun non-fungsional. Perancangan sistem dilakukan menggunakan metode Unified Modeling Language (UML) yang mencakup Use Case Diagram, Activity Diagram,	memberikan informasi tentang administrasi, layanan kesehatan, BUMDes, e-pasar, serta program-program desa lainnya. Implementasi sistem ini telah dilakukan di Gampong Nga, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, dan dinilai mampu meningkatkan kualitas	Sistemnya juga bersifat interaktif dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	responsif dan komunikatif terhadap pertanyaan pengguna.
--	--	---	---	--	---	--

			Sequence Diagram, dan perancangan antarmuka pengguna. Tahap akhir penelitian dilakukan dengan pengujian menggunakan metode blackbox testing untuk memastikan kesesuaian fungsi sistem dengan rancangan yang telah dibuat.	pelayanan publik serta mendukung penerapan konsep Smart Village.		
--	--	--	---	---	--	--

4.	Pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Gampong Ulee Tuy. Oleh Abid Rifaldi, Raihan Wilda, Marlina, dan Taufik (2024). 36	Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Gampong Ulee Tuy, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara dengan aparatur gampong seperti keuchik, sekretaris desa, kaur pemerintahan, kasi pelayanan, dan operator.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIGAP diterima dengan baik oleh aparatur gampong karena mempermudah proses pendataan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Enam indikator utama—kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, pemakaian,	Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas SIGAP sebagai sistem e-government di tingkat desa serta menyoroti manfaatnya dalam transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masih terdapat kendala teknis seperti fitur surat menyurat yang belum aktif, keterbatasan fasilitas komputer, dan kurangnya sosialisasi penggunaan SIGAP kepada masyarakat yang masih awam terhadap teknologi.
----	--	--	---	--	---	---

³⁶ Raihan Wilda, Marlina, and Abid rifaldi, “Pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (Sigap) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Gampong Ulee Tuy,” *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 40–46, <https://doi.org/10.22373/jrpm.v4i2.3784>.

				kepuasan pengguna, dan manfaat bersih—telah diterapkan dengan baik. Namun, fitur surat menyurat masih belum dapat digunakan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan publik.		
--	--	--	--	--	--	--



2.2. Perbedaan Penelitian dan Persamaan Penelitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dahulu yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa Berbasis Web untuk Meningkatkan Manajemen Administrasi Desa (Studi Kasus: Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara)”. Yang disusun oleh Rafik, Khairul Umami, Silva Aulia Salsabila, Widya Afiliani, Alifa Zairinadya, Yenni, Wira Santia, Siti Aminah, Aswin Nasution. Dimana penelitian tersebut berfokus pada pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Desa yang berbasis web untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam layanan administrasi. Sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus bagaimana Sistem Informasi Gampong (SIGAP) ini dapat mendukung perkembangan pemerintahan di tingkat kecamatan.

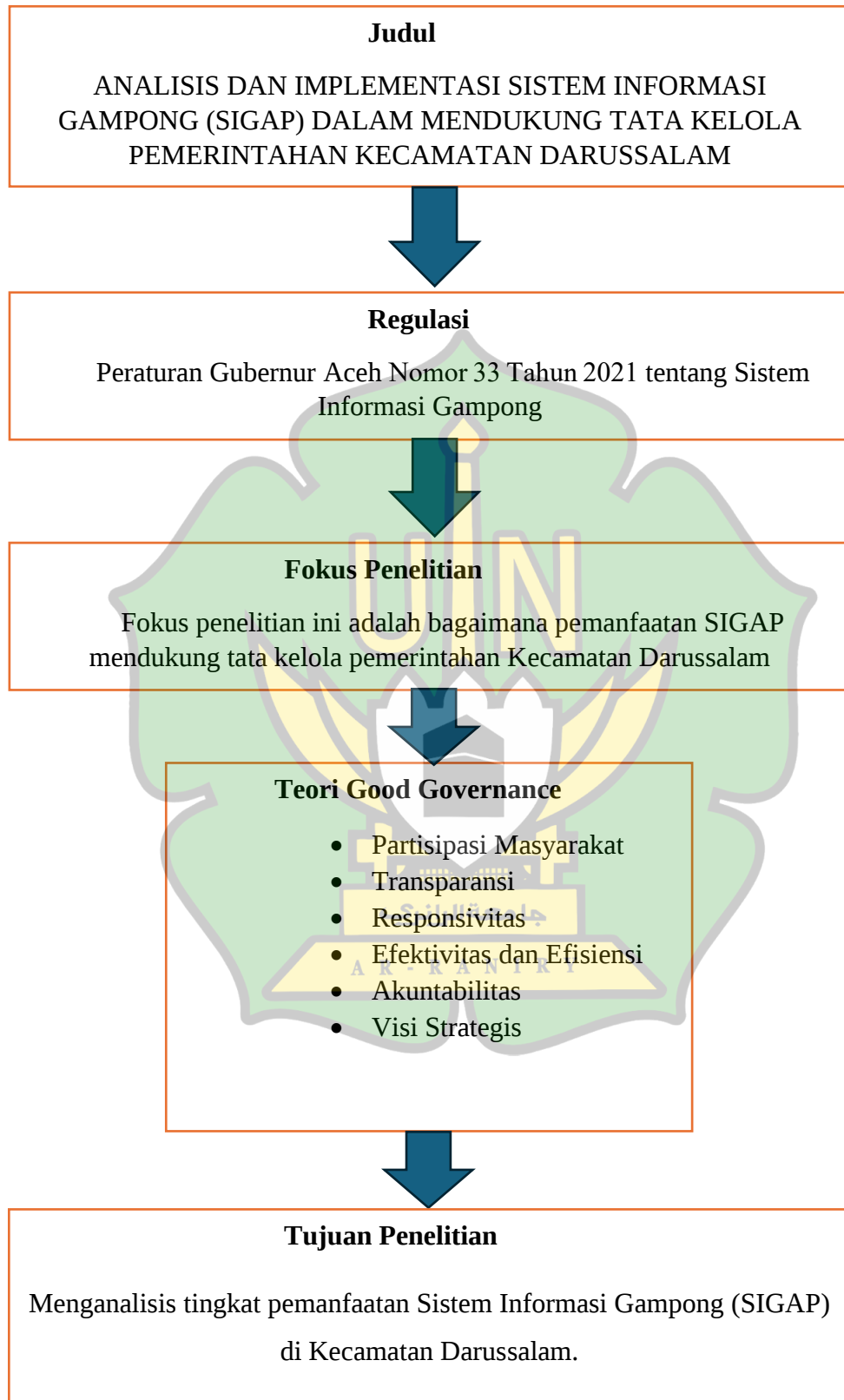
Selain itu penelitian yang berjudul “Pelatihan dan Pendampingan Sistem Informasi Administrasi dan Web Mobile untuk Aparatur Gampong Uteunkot Kota Lhokseumawe”. Yang disusun oleh Mutammimul Ula, Zahratul Fitri, Fakhurrrazi, Zul Akli, Zainal Abidin, dan Mochamad Ari Saptari menggunakan metode penelitian Mengimplementasikan pendekatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui langkah-langkah seperti analisis kebutuhan, survei, perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, serta evaluasi dan monitoring. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara melakukan pengamatan dan interaksi melalui wawancara bersama petugas desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala seksi pelayanan, dan operator.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berjudul “*Pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Gampong Ulee Tuy*” karya Abid Rifaldi, Raihan Wilda, Marliana, dan Taufik terletak pada fokus utama yang sama-sama membahas penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di lingkungan

pemerintahan gampong. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam melihat peran SIGAP sebagai inovasi digital yang mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa atau gampong. Baik penelitian ini maupun penelitian terdahulu sama-sama menyoroti bagaimana SIGAP berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.



2.3. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Darussalam yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan ini memiliki luas sekitar 38,43 km² yang terbagi menjadi 3 Mukim. Dalam hal geografi, Kecamatan Darussalam berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya di sebelah utara; Kecamatan Kuta Baro di selatan; Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kota Banda Aceh di barat; serta Kecamatan Mesjid Raya di sisi timur. Kecamatan Darussalam terletak di daerah non-pesisir yang tidak memiliki batas langsung dengan laut.

Pada tahun 2024, populasi di Kecamatan Darussalam diperkirakan mencapai sekitar 24. 076 orang, dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 626 orang per km². Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Tanjung Selamat. Kecamatan ini menunjukkan perbedaan dalam kepadatan penduduk antar desa, dengan Desa Tungkop memiliki kepadatan tertinggi dan Desa Krueng Kalee sebagai yang terendah.³⁷

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini meneliti seberapa efektif penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dalam mendukung pengelolaan pemerintahan di Kecamatan Darussalam. Penelitian ini mengamati kemampuan SIGAP dalam membantu pemerintah mengelola informasi, administrasi, pelayanan, serta mendukung tata kelola pemerintah yang lebih efisien dan berbasis teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat penggunaan SIGAP, seperti kesiapan SDM, kelengkapan data, partisipasi masyarakat, dan optimalisasi aplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Darussalam. Dengan

³⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar “<https://acehbesarkab.bps.go.id/id>”

demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai keadaan pemanfaatan SIGAP serta tingkat efektivitas aplikasi tersebut dalam mendukung pengelolaan pemerintah di Kecamatan Darussalam.

3.3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan yang dihadapi oleh sekelompok individu atau kelompok.³⁸ Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu yang belum diketahui di balik fenomena tersebut.

Metode ini sering diterapkan untuk mempelajari fenomena yang rumit dan tidak bisa diukur dengan angka, seperti pola komunikasi, pengalaman, sikap, serta interaksi sosial. Dalam pengumpulan datanya, digunakan teknik seperti wawancara mendalam, observasi langsung, studi dokumen, dan diskusi kelompok. Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan induktif untuk menemukan pola dan makna yang muncul dari data tersebut, di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam proses interpretasi. Penelitian kualitatif berfokus pada konteks alami di mana fenomena terjadi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh.

³⁸ Hussein Fahmy Suleiman and Abdul-Mo'en Ahmed Jassim, "Deskripsi Mendalam Untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif," *Sports Cul* 72–86, <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data observasi merupakan metode untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan melalui peninjauan langsung terhadap suatu objek, peristiwa, atau tingkah laku yang sedang diteliti. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung penggunaan dan pemanfaatan SIGAP dalam kegiatan pemerintahan di Kecamatan Darussalam. Melalui observasi, peneliti dapat melihat bagaimana sistem tersebut digunakan, proses pengelolaan informasi, serta kondisi nyata pemanfaatan SIGAP dalam mendukung penataan pemerintahan. Dalam tahap ini, peneliti tidak hanya melihat, tetapi juga mencatat situasi atau perilaku objek tersebut dengan cara yang sistematis, sehingga data yang dikumpulkan dapat dipercaya, tepat, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti observasi partisipatif di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diamati, atau observasi non-partisipatif di mana peneliti hanya mengamati tanpa ikut serta. Selain itu, observasi dapat bersifat terstruktur dengan pedoman yang jelas atau tidak terstruktur yang memberikan kebebasan yang lebih.³⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pertemuan antara dua individu yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab. Melalui interaksi ini, makna mengenai suatu topik tertentu dapat dibangun dan dipahami dengan lebih baik. Selain itu, wawancara juga merupakan metode untuk mengumpulkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara adalah suatu metode yang melibatkan

³⁹ Sugiyono, "Penegertian Observasi" 28, no. 2 (2020): 16.

interaksi langsung antara pewawancara dan responden, dilaksanakan secara lisan. Hasil dari wawancara ini berupa jawaban yang diberikan oleh responden, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan menjadi data penting dalam penulisan ini. Selama proses wawancara, penulis harus mendengarkan dengan seksama dan mencatat segala yang disampaikan oleh informan. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.⁴⁰

3.5. Informan Penelitian

Informan dalam suatu penelitian merupakan subjek atau individu yang berfungsi sebagai sumber data utama. Mereka adalah orang-orang yang memberikan informasi penting yang berkaitan dengan objek penelitiannya. Informan umumnya dipilih secara selektif berdasarkan kriteria tertentu agar dapat menyuplai data yang relevan, dapat dipercaya, dan mencerminkan keadaan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai objek penelitian, baik sebagai pelaku maupun pengamat, dan diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat tentang aspek yang sedang diteliti.⁴¹

⁴⁰ Imami Nur Rachmawati, “Jurnal Tentang Wawancara Di Metode Penelitian Kualitatif Derskriptif Yg Valid,” *Indonesian Journal of Nursing* 11, no. 1 (2007): 35–40.

⁴¹ Kiki Sapmala Marbun, Hasian Romadon Tanjung, and Anni Rahima, “Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah,” *Pendidikanbahasadansastraindonesia* 1, no. 2 (2021): 2775–4693.

No.	Jabatan/Status Informan	Jumlah
1.	Sekretaris kecamatan Darussalam	1 Orang
2.	Staf TTG DPMG Aceh	2 Orang
3.	Sekretaris gampong Miruk Taman	1 Orang
4.	Keuchik gampong Lambaro Sukon	1 Orang
5.	Keuchik gampong Tanjong Seulamat	1 Orang
6.	Operator gampong Limpok	1 Orang

Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu staf atau pegawai kantor DPMG Aceh di bidang Teknologi Tepat Guna (TTG), masyarakat dan aparat desa dan pemerintah di Kecamatan Darussalam. Perangkat desa memiliki peran sebagai pelaksana teknis dan berpengalaman dalam bertugas mengelola dan menjalankan Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Masyarakat dipilih sebagai informan untuk mengukur dampak pemanfaatan SIGAP. Di sisi lain, pemerintah Kecamatan Darussalam merupakan informan yang krusial karena berperan sebagai pihak yang membina dan mengawasi pelaksanaan SIGAP di daerahnya.

3.6. Sumber Data

Data penelitian berasal dari dua jenis sumber: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari responden yang diwawancarai data ini juga dikenal sebagai data asli atau data baru. Di sisi lain, sumber data sekunder mencakup informasi yang diperoleh setelah sumber data primer, yang diambil dari berbagai referensi seperti

perpustakaan, laporan penelitian sebelumnya, dokumen, serta tulisan-tulisan relevan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴²

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari asalnya tanpa melalui pihak ketiga. Data ini dikumpulkan oleh peneliti dengan berbagai cara, seperti wawancara, survei, kuesioner, pengamatan langsung, eksperimen, atau diskusi dalam kelompok yang fokus. Data sekunder merujuk pada informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, tetapi melalui media lain atau dokumen yang sudah ada, seperti buku, jurnal, laporan, catatan, atau arsip.⁴³

3.7. Teknik Analisis Data

Proses yang terencana dengan tujuan untuk mengenali dan menjelaskan fenomena melalui data yang tidak berupa angka. Tahapan ini dimulai dengan mengumpulkan data melalui cara-cara seperti wawancara dan pengamatan. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah penyempitan data, yaitu menyederhanakan dan mengarahkan data agar lebih mudah diatur dan relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu, data yang telah dipersempit disajikan dalam format yang teratur, seperti narasi, tabel, atau diagram, sehingga pola dan hubungan antar tema dapat terlihat dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang menyusun informasi kunci dari analisis tersebut, dituliskan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tanpa berpanjang lebar.

3.8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada pertengahan bulan awal bulan Januari 2026, dengan fokus utama pada tahap pelaksanaan di lapangan. Peneliti mulai mengumpulkan data utama melalui

⁴² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, vol. 1, 2021.

⁴³ Inayah Mawaddah Inadjo, Benedicta J Mokalu, and Nicolaas Kandowanko, "Definisi Data Primer," *Journal Ilmiah Society* 3, no. 1 (2023): 1–7.

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di area penelitian. Dalam tahap ini, peneliti berhubungan langsung dengan narasumber seperti perangkat desa, masyarakat, dan pihak kecamatan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Di samping itu, peneliti juga mencatat dan merangkum hasil awal agar data yang dikumpulkan tetap akurat. Aktivitas ini dilakukan secara intensif selama beberapa hari sampai semua data yang diperlukan terkumpul secara lengkap dan valid.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Aceh Besar, di Provinsi Aceh. Terletak di bagian selatan Banda Aceh, daerah ini dikenal karena kombinasi permukiman, pertanian, dan beberapa lokasi bersejarah yang berkaitan dengan periode setelah tsunami. Dari segi administrasi, Darussalam memiliki luas sekitar 38,43 km², terdiri atas 29 gampong yang terbagi menjadi 3 mukim, yaitu Lambaro Angan, Siem, dan Tungkop. Kecamatan ini terletak di selatan Kabupaten Aceh Besar dengan koordinat sekitar 5°30' N dan 95°26' E. Darussalam berbatasan dengan beberapa kecamatan lain di Aceh Besar dan tidak langsung di tepi laut, sehingga lebih didominasi oleh aktivitas pertanian dan permukiman pedalaman. Kantor camat berada di Lambada Peukan, sementara ibukota kecamatan terletak di Lambaro Angan.



Gambar 4.1 Dashboard SIGAP kecamatan Darussalam

Darussalam merupakan salah satu kecamatan di Aceh Besar yang dapat diintegrasikan dalam penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) untuk monitoring dan evaluasi program pemberdayaan. Secara geografis dan sosial, Kecamatan Darussalam memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berfungsi sebagai kawasan penyangga utama bagi pusat aktivitas dan perekonomian ibu kota provinsi. Wilayah ini dikenal luas sebagai pusat dan simbol pendidikan di Aceh karena sebagian lokasinya terintegrasi langsung dengan kawasan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam yang memuat perguruan tinggi terbesar di Aceh, seperti Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry.

Kehadiran puluhan ribu mahasiswa dan aktivitas akademis yang padat memberikan dampak signifikan terhadap struktur perekonomian lokal. Sektor penyedia jasa seperti hunian kos, tempat kuliner, perniagaan, hingga UMKM tumbuh sangat pesat di sepanjang jalur utama kecamatan ini. Meski demikian, di luar kawasan permukiman padat dan lingkaran kampus, masyarakat di gampong-gampong Kecamatan Darussalam tetap mempertahankan sektor pertanian, persawahan, dan perkebunan sebagai salah satu penopang utama kehidupan ekonomi mereka.

4.2. Pengertian SIGAP

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 33 Tahun 2021 mengenai Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dikeluarkan sebagai panduan resmi untuk Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah gampong (desa) dalam pelaksanaan sistem digital terintegrasi. Aturan ini dibuat untuk mencapai pengintegrasian data gampong secara bertahap dari

tingkat desa ke kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi demi mendukung inisiatif Satu Data Aceh dengan cara yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴

Sistem SIGAP berfungsi sebagai platform terpadu untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan data penduduk yang terstruktur, hingga pencatatan profil dan potensi ekonomi desa. Selain itu, aplikasi ini juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik digital, seperti mempermudah proses administrasi dan pembuatan dokumen bagi masyarakat secara elektronik.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Aceh berperan sebagai pengembang utama dan pembina sistem, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertugas untuk mengoordinasikan penerapan di wilayah masing-masing. Di sisi lain, pemerintah gampong berfungsi sebagai operator lapangan yang bertanggung jawab untuk secara rutin memasukkan dan memperbarui data agar layanan masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Dokumen lengkap mengenai regulasi ini bisa diakses secara resmi melalui portal. Sistem Informasi Gampong (SIGAP) merupakan platform yang berbasis web yang dirancang secara terpadu oleh Pemerintah Aceh untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat di tingkat gampong. Dengan kata lain, SIGAP dapat dipahami sebagai alat digital yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan mendistribusikan data serta informasi yang relevan dengan gampong. Sistem ini menjadi solusi modern pengganti metode manual yang sebelumnya sering digunakan dalam administrasi desa, sekaligus mempercepat akses informasi bagi aparat gampong, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam hal kebijakan daerah, SIGAP muncul sebagai bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat

⁴⁴ PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM INFORMASI GAMPONG

dipertanggungjawabkan. Berdasarkan informasi yang tersedia dari sumber yang terkait, SIGAP dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh bersinergi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, dengan dukungan dari berbagai pihak. Sistem ini juga berhubungan dengan kewajiban pengembangan sistem informasi desa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk keperluan untuk menyediakan data yang terintegrasi bagi perencanaan dan pelayanan publik.

1. Fungsi

SIGAP berperan sebagai tempat untuk menyimpan dan mempresentasikan informasi yang dulunya tersebar di berbagai dokumen secara manual. Informasi yang dimaksud meliputi profil desa, data penduduk, informasi kelembagaan, data aparatur, rencana pembangunan, data keuangan, dokumentasi kegiatan, surat-menyurat, serta informasi lain yang diperlukan untuk mendukung layanan publik dan kemajuan desa. Dengan keberadaan SIGAP, aparatur desa dapat bekerja lebih terorganisir karena banyak proses administratif menjadi lebih mudah diakses dan cepat diproses. Untuk masyarakat, sistem ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai desa secara lebih transparan. Di sisi pemerintah daerah, SIGAP mendukung pembinaan dan pengawasan karena data dari desa dapat dirangkum dalam bentuk agregat mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

2. Latar Belakang Munculnya SIGAP

SIGAP muncul sebagai respons terhadap kebutuhan nyata dalam memperbarui administrasi desa di Aceh. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, banyak desa yang menghadapi berbagai masalah, seperti pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, kekurangan tenaga kerja, kurangnya integrasi data, dan lambatnya proses pelayanan kepada masyarakat. Hal ini seringkali

mengakibatkan data menjadi tidak terkini, dokumen sulit ditemukan, dan perencanaan pembangunan tidak didukung oleh data yang memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Aceh memperkenalkan SIGAP sebagai alat digital berbasis web yang mengubah proses tradisional menjadi proses elektronik. Dengan sistem ini, pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terorganisir dengan baik. Dari perspektif administrasi publik, SIGAP merupakan langkah signifikan dalam mendorong digitalisasi pemerintahan di tingkat yang paling dasar, yaitu gampong.

3. Komponen Data Dalam SIGAP

SIGAP dirancang untuk menampung berbagai jenis data yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong (SIGAP), Muatan SIGAP terdiri dari:

- a. Informasi Gampong
- b. Data Gampong
- c. Layanan Gampong

Didalam Sistem Informasi Gampong berisi muatan informasi dari setiap gampong sebagaimana dimaksud pada BAB IV pasal 7 ayat (a) terdiri dari:

- a. Profil Gampong
- b. Regulasi;
- c. Kegiatan Dan Kinerja Gampong;
- d. Dokumen Pembangunan;
- e. Rencana Dan Anggaran;
- f. Laporan Keuangan;
- g. Peta;

- h. Jumlah Penduduk; Dan
- i. Capaian *Sustainable Development Goals* Gampong.

Didalam Profil Gampong sebagaimana dimaksud pada BAB IV pasal 7 ayat (2) huruf harus memenuhi kriteria yang diatur peraturan perundang-undangan. Kegiatan kinerja Gampong yang terdapat dalam SIGAP meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- b. Pembangunan Gampong.
- c. Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Pembinaan Masyarakat Dan Kebencanaan Atau Hal Mendesak/ Tanggap Darurat.

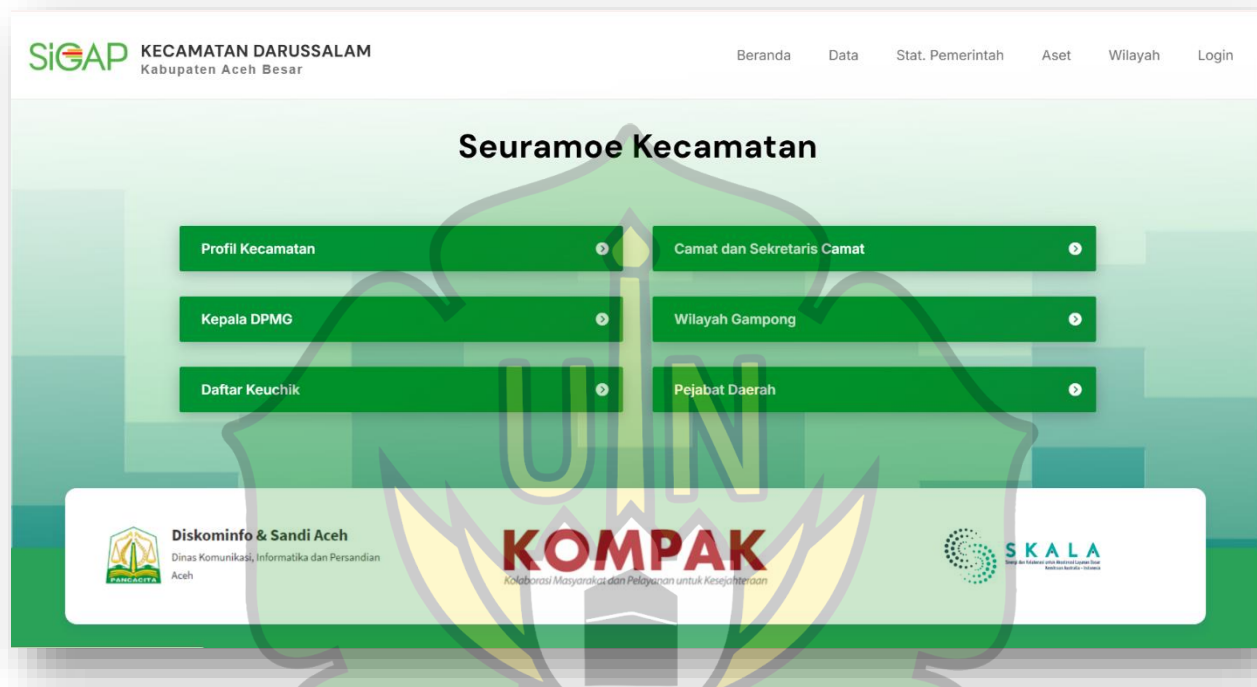
Pada Sistem Informasi Gampong (SIGAP) ini juga terdapat fitur data gampong yang terdiri dari:

- a. data kesehatan
- b. data pendidikan.
- c. data kependudukan.
- d. data bantuan.
- e. basis data terpadu/data terpadu kesejahteraan sosial/data registrasi sosial ekonomi.

Dalam SIGAP ini juga terdapat fitur layanan gampong yang meliputi:

- a. surat menyurat
- b. arsip surat
- c. layanan pengaduan masyarakat
- d. jumlah pengaduan yang diterima
- e. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap pengaduan

- f. jumlah tindak lanjut dan penolakan pengaduan
- g. alasan penolakan pengaduan
- h. timbal balik penilaian kinerja
- i. layanan lainnya.



Gambar 4.2 Menu SIGAP Kecamatan Darussalam

Kelengkapan informasi ini sangat krusial karena gampong memerlukan data tidak hanya untuk keperluan administrasi sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung kebijakan pembangunan. Sebagai contoh, data demografi bisa dimanfaatkan untuk pelayanan surat-menyurat dan pengumpulan data sosial; data lembaga dapat membantu dalam pengembangan ekonomi lokal; sementara data perencanaan dan keuangan dapat membantu pemerintah gampong dalam merancang program kerja yang lebih terarah. Oleh karena itu, SIGAP bukan hanya berdiri sebagai aplikasi teknis, melainkan menjadi dasar informasi untuk pembangunan desa yang berbasis pada bukti.

4. Tujuan SIGAP

Tujuan utama SIGAP adalah menciptakan sistem informasi terpadu yang mendukung tata kelola pemerintahan gampong secara efektif. Melalui sistem ini, Pemerintah Aceh ingin menghadirkan basis data dan informasi yang dapat dipakai untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi kebijakan di tingkat gampong. Dengan kata lain, SIGAP dirancang agar data tidak hanya tersimpan, tetapi juga benar-benar dipakai untuk pengambilan keputusan.

Selain itu, SIGAP juga bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketika informasi gampong tersedia dalam sistem yang terbuka dan terstruktur, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance, yakni pemerintahan yang partisipatif, transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Aceh, SIGAP juga dipahami sebagai bagian dari agenda besar Aceh SIAT atau Sistem Informasi Aceh Terpadu.

5. Manfaat Bagi Gampong

Manfaat SIGAP dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi administrasi, sistem ini mempermudah aparat gampong dalam mengelola dokumen dan data. Pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu lama karena dilakukan manual kini dapat dipercepat melalui sistem digital. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan pencatatan. Kedua, dari sisi pelayanan publik, SIGAP membantu masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik karena data lebih mudah ditemukan dan diproses. Ketiga, dari sisi perencanaan pembangunan, SIGAP menyediakan data yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program prioritas sesuai kebutuhan riil masyarakat. Keempat, dari sisi akuntabilitas, sistem ini memudahkan pemerintah

gampong untuk menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau.

4.3. Hasil Penelitian

Pada tahap ini, akan dibahas hasil pengamatan dari penelitian yang dilakukan di lapangan saat penelitian berlangsung, berkaitan dengan “Implementasi Sistem Informasi Desa (Sigap) Dalam Penatanaan Pemerintahan Kecamatan Darussalam”. Penelitian ini dilakukan pada desa yang telah menerapkan sistem, untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan SIGAP di kecamatan Darussalam, peneliti mengambil sampel penelitian dari 4 gampong yang ada di kecamatan diantaranya gampong Miruk Taman, Lambaro Sukon, Tanjong Seulamat, dan Limpok. Pada tahap ini, peneliti menggunakan perbandingan dengan dua gampong yang pemanfaatan atau pengoperasian SIGAP ini ideal atau maksimal dan dua gampong yang kurang maksimal. Metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara langsung. Dengan menggunakan Sekretaris Kecamatan sebagai acuan utama sumber hasil penelitian. Penilaian hasil penelitian dinilai dari indikator teori *Good Governance*.

4.3.1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan langsung warga dalam proses suatu kegiatan, program, pembangunan, atau proses pengambilan keputusan publik. Dalam kerangka pemerintahan yang baik, peran serta ini menjadi salah satu dasar penting yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, untuk saat ini keterlibatan warga di Kecamatan Darussalam dalam penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) masih sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat belum menggunakan SIGAP untuk mencari informasi tentang gampong, menyampaikan aspirasi, atau memantau pelayanan serta pembangunan desa. Hal ini menunjukkan

bahwa penggunaan SIGAP lebih banyak dilakukan oleh aparat gampong dibandingkan oleh masyarakat umum. Rendahnya partisipasi warga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi tentang fungsi dan manfaat SIGAP, lambatnya literasi digital di kalangan masyarakat, serta kebiasaan yang masih bergantung pada informasi dari aparat gampong. Situasi ini menjadikan SIGAP belum optimal sebagai alat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan gampong. Selain itu, pengamatan juga menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya ikut serta dalam proses perencanaan dan pengawasan melalui SIGAP. Akibatnya, potensi aplikasi ini sebagai alat partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong belum maksimal. Tanpa pendampingan dan edukasi yang terus-menerus, SIGAP hanya akan berfungsi sebagai sistem administrasi internal, bukan sebagai ruang partisipatif bagi masyarakat.

Dari hasil studi menunjukkan bahwa faktor keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan SIGAP tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi juga oleh adanya kebutuhan nyata untuk memperbarui database dalam aplikasi tersebut. Partisipasi masyarakat akan lebih meningkat jika mereka merasa bahwa informasi yang ada di SIGAP benar-benar mencerminkan situasi terkini di lapangan, baik terkait data penduduk, data kegiatan, maupun informasi pembangunan gampong. Oleh karena itu, keberadaan database yang terupdate menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam menggunakan SIGAP.

Masyarakat melihat SIGAP sebagai sumber informasi yang akan lebih bermanfaat jika dikelola dengan aktif dan diperbarui secara teratur. Apabila data yang ditampilkan sudah usang, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, masyarakat cenderung tidak percaya pada sistem itu dan akhirnya kurang bersemangat untuk berpartisipasi. Sebaliknya, jika basis data diperbarui secara berkala, masyarakat akan menyadari bahwa aplikasi tersebut

memberikan keuntungan langsung untuk kebutuhan administrasi, transparansi informasi, dan pelayanan gampong.

Mengacu pada Sejauh mana SIGAP ini membantu masyarakat menyampaikan harapan (aspirasi) dan kebutuhan kepada pemerintah gampong, peneliti melakukan wawancara dengan Sekcam Darussalam, beliau menyebutkan bahwa:

“Tentu saja SIGAP ini akan sangat membantu jika aplikasi ini bisa diakses lebih mendalam oleh masyarakat gampong. Namun, dikarenakan perangkat gampong tidak memungkinkan untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi SIGAP ini secara langsung, takutnya nanti ada warga yang menyalahgunakan aplikasi ini, makanya pemanfaatan SIGAP ini belum optimal. Harus ada akun khusus yang diberikan untuk masyarakat.”⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwasanya aplikasi SIGAP ini akan sangat membantu masyarakat secara penuh dalam hal layanan. Namun muncul kebijakan dan pertimbangan teknis dari pemerintah atau aparat gampong yang membatasi akses langsung hak guna bagi warga. Alasan utama di balik pembatasan ini adalah kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan sistem atau penginputan data yang tidak terverifikasi jika akses diberikan secara bebas kepada masyarakat tanpa pengawasan yang ketat.

4.3.2. Transparansi

Transparansi merupakan kondisi yang jelas, nyata, dan terbuka, di mana tidak ada tujuan yang tersembunyi dan informasi yang penting disediakan sepenuhnya untuk semua pihak yang berkepentingan. Secara umum, transparansi merujuk pada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, penyampaian informasi, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya, terutama dalam konteks pemerintahan, organisasi, dan lembaga publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekcam Darussalam mengenai transparansi pelaksanaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kecamatan Darussalam, diketahui bahwa prinsip transparansi informasi publik belum berjalan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Sekretaris kecamatan Darussalam, Bapak Masri Fithrian, ST. M.Si di kantor camat Darussalam pada tanggal 21 Juli 2026

dengan baik. Meskipun SIGAP dirancang sebagai alat untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan gampong, akses terhadap aplikasi ini terbatas hanya untuk perangkat gampong atau aparat desa, sehingga masyarakat luas tidak bisa mengakses informasi secara langsung. Aplikasi SIGAP hanya bisa diakses oleh petugas gampong dengan menggunakan login admin yang didukung username dan password khusus, sehingga data yang terkumpul tidak dapat diakses oleh publik. Walaupun terdapat fitur dashboard dalam SIGAP yang seharusnya dapat diakses publik untuk melihat data-data gampong, pada kenyataannya, fitur ini tidak berfungsi atau tidak disebarluaskan dengan baik kepada masyarakat di Kecamatan Darussalam.

Beliau menyebutkan bahwa ;

“Untuk keterbukaan informasi di kecamatan Darussalam menuju optimal atau ideal dapat kita lihat dari fitur-fitur dan menu-menu yang terdapat dalam SIGAP ini. Untuk indikator transparansi di kecamatan darussalam sudah memenuhi. Namun dikarenakan akses untuk SIGAP ini hanya diberikan untuk operator gampong maka masyarakat harus tetap perlu izin dari operator gampong untuk menggunakan aplikasi ini.”⁴⁶

Pembatasan akses ini menghalangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penilaian terhadap pembangunan gampong, yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Desa dan prinsip pemerintahan yang baik. Versi SIGAP 1. 7. 5 dan 1. 8 diciptakan dengan konsep "Kaya Data dan Informasi, Minim Input" untuk memperkuat transparansi, namun di lapangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Secara teori, SIGAP seharusnya menawarkan tiga elemen utama yang mencakup Informasi, Data, dan Layanan yang bisa diakses oleh publik. Namun, di Kecamatan Darussalam, akses ini hanya diberikan kepada aparat gampong untuk memasukkan data administratif, sementara masyarakat tidak bisa melihat informasi tersebut secara langsung.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Sekretaris kecamatan Darussalam, Bapak Masri Fithrian, ST. M.Si di kantor camat Darussalam pada tanggal 21 Juli 2026

Pembatasan akses ini memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek pemerintahan. Masyarakat tidak dapat memantau informasi mengenai rencana, keuangan, dan pembangunan gampong secara langsung, yang mengakibatkan transparansi tidak terwujud. Tanpa akses dari publik, akuntabilitas vertikal atau tanggung jawab pemerintah gampong kepada masyarakat menjadi lemah. Masyarakat pun tidak bisa terlibat secara aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi karena informasi tidak dapat diakses. Untuk meningkatkan transparansi informasi SIGAP di Kecamatan Darussalam, diperlukan beberapa langkah strategis. Pemerintah kecamatan harus mengaktifkan dan mempublikasikan dashboard SIGAP yang bisa diakses oleh masyarakat umum tanpa perlu login. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan tentang cara mengakses informasi dari SIGAP melalui dashboard publik. Selain itu, aparat gampong perlu mendapatkan pelatihan dalam mengelola serta mempublikasikan informasi melalui SIGAP. DPMG Aceh harus melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi SIGAP di setiap kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Camat (Sekcam) Darussalam, diketahui bahwa masyarakat dapat mengakses seluruh menu yang tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Hal ini menunjukkan bahwa SIGAP memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat melalui berbagai menu yang telah disediakan dalam aplikasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dapat memperoleh informasi tertentu, tetapi memiliki kesempatan untuk mengakses seluruh informasi yang tersedia pada SIGAP sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketersediaan akses terhadap seluruh menu tersebut menjadi salah satu bentuk transparansi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

Beliau menjelaskan bahwa;

“Data-data yang bisa diakses oleh masyarakat dalam aplikasi SIGAP adalah semua menu yang ada pada SIGAP. Namun, dikarenakan data-datanya masih banyak yang belum lengkap. Jadi hanya data yang terisi saja yang dapat di lihat.”⁴⁷

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Camat (Sekcam) Darussalam, diketahui bahwa keberadaan aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) pada dasarnya memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara lebih mudah. Menurut beliau, apabila aplikasi SIGAP telah berjalan secara optimal, lengkap, dan didukung oleh data yang akurat serta mutakhir, masyarakat tentunya akan merasa sangat terbantu dan memberikan respons yang positif terhadap kehadiran aplikasi tersebut. Namun, dalam kondisi saat ini, pelaksanaan SIGAP masih memerlukan waktu dan proses penyempurnaan, khususnya dalam hal kelengkapan dan pembaruan data yang tersedia di dalam aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya secara berkelanjutan dari pihak terkait untuk melengkapi, memperbarui, dan menyempurnakan data dalam SIGAP agar aplikasi tersebut dapat berfungsi secara optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

4.3.3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan suatu lembaga, organisasi, atau instansi publik untuk memahami kebutuhan masyarakat, merancang agenda dan prioritas pelayanan, serta menciptakan program pelayanan baru yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Responsivitas menunjukkan kemampuan dan kesiapan penyedia layanan untuk memberikan bantuan serta pelayanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal waktu, aksesibilitas, dan komunikasi, berdasarkan hasil wawancara terkait responsivitas dalam pelaksanaan Sistem

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Sekretaris kecamatan Darussalam, Bapak Masri Fithrian, ST. M.Si di kantor camat Darussalam pada tanggal 21 Juli 2026

Informasi Gampong (SIGAP), diketahui bahwa masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan SIGAP belum dapat berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, di mana sebagian layanan pada saat ini masih dilakukan secara manual.

Dengan demikian, meskipun SIGAP telah tersedia sebagai sarana pelayanan dan penyampaian informasi secara digital, pemanfaatannya belum sepenuhnya mampu menggantikan proses pelayanan secara langsung atau manual. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi SIGAP tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem atau aplikasi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kemampuan dalam mengelola dan mengoperasikan aplikasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal penting agar SIGAP dapat dimanfaatkan secara optimal dan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sekretaris kecamatan Darussalam menjelaskan bahwa;

“Masih terdapat keterbatasan SDM. Setelah itu SIGAP ini cuma hanya bisa diakses oleh perangkat desa dan layanan saat ini masih dilakukan secara manual di kantor desa. Untuk permohonan layanan SIGAP ini sangat mempermudah kebutuhan masyarakat. Namun saat ini aplikasi ini belum berfungsi secara optimal atau bisa kita bilang menuju optimal”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara terkait responsivitas dalam pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), untuk melihat apakah SIGAP mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau permohonan layanan. Diketahui bahwa keberadaan SIGAP pada dasarnya diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris kecamatan Darussalam, Bapak Masri Fithrian, ST. M.Si di kantor camat Darussalam pada tanggal 21 Juli 2026

memperoleh informasi yang diperlukan. Penggunaan SIGAP dapat menjadi sarana untuk memberikan pelayanan secara lebih mudah dan efisien sehingga masyarakat tidak harus selalu datang secara langsung ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan. Namun, berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, pelayanan kepada masyarakat sampai saat ini belum sepenuhnya menggunakan aplikasi SIGAP.

Sebagian besar pelayanan masih dilakukan secara manual atau secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun SIGAP memiliki potensi dalam meningkatkan responsivitas pelayanan, pemanfaatannya dalam proses pelayanan masyarakat masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan SIGAP sebagai media pelayanan agar kebutuhan masyarakat dapat direspons dengan lebih cepat, mudah, dan efektif.

Untuk responsivitas dalam pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), diketahui bahwa untuk saat ini belum dapat dikatakan secara pasti bahwa keberadaan SIGAP telah meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena pemanfaatan SIGAP dalam pelayanan masyarakat masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Darussalam, beliau menegaskan bahwa;

“Seperti yang kita bilang tadi, untuk saat ini belum bisa dikatakan atau kita patok bahwasanya dengan adanya SIGAP ini kualitas layanan sangat meningkat. Namun berdasarkan tinjauan, layanan dalam SIGAP ini dalam proses menuju optimal.”⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Sekretaris kecamatan Darussalam, Bapak Masri Fithrian, ST. M.Si dikantor camat Darussalam pada tanggal 21 Juli 2026

Meskipun demikian, hasil tinjauan di lapangan, pemanfaatan SIGAP menunjukkan adanya proses menuju kondisi yang lebih optimal. Dengan demikian, SIGAP memiliki potensi untuk mendukung peningkatan kualitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat, namun hasil peningkatan tersebut belum dapat dinilai secara maksimal pada kondisi saat ini. Diperlukan proses penyempurnaan dan pengembangan secara berkelanjutan agar SIGAP dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.3.4. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tindakan atau upaya dapat berhasil mencapai sasaran atau hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, sebuah aktivitas dianggap efektif jika dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, seperti menyelesaikan tugas dengan hasil yang akurat sesuai dengan tujuan. Efektivitas lebih fokus pada "apakah tujuan telah berhasil dicapai" dengan baik. Efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya dengan cara yang optimal dalam mencapai hasil tersebut. Efisiensi berarti melaksanakan pekerjaan dengan metode yang benar sehingga tidak menghabiskan sumber daya secara berlebihan dan menghasilkan output maksimal dengan input yang minimal. Fokus efisiensi adalah pada penghematan dan ketepatan dalam pelaksanaan sebuah proses.

Untuk melihat ketepatan penggunaan SIGAP dalam meningkatkan pelayanan administrasi gampong, peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris kecamatan Darussalam, beliau menegaskan bahwa;

“jika kita lihat untuk ketepatan penggunaan SIGAP ini tentu sudah tepat, karna di Darussalam belum ada kami temukan kasus-kasus penyalahgunaan dalam aplikasi ini.

Namun untuk perihal layanan administrasi gampong itu seperti yang saya bilang tadi, masih melakukan pelayanan manual.”⁵⁰

Dari hasil wawancara tersebut terkait efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), diketahui bahwa pelayanan administrasi gampong sampai saat ini masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan SIGAP dalam mendukung proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Meskipun SIGAP telah tersedia sebagai sarana informasi dan pelayanan berbasis digital, proses administrasi masih banyak dilakukan secara langsung dan menggunakan prosedur manual. Hal ini menyebabkan fungsi SIGAP dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan belum dapat dirasakan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemanfaatan SIGAP dalam proses administrasi gampong agar pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap proses pelayanan secara manual.

Dari hasil wawancara terkait efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), diketahui bahwa keberadaan SIGAP pada dasarnya memiliki potensi untuk menghemat waktu dalam proses pelayanan kepada masyarakat apabila aplikasi tersebut dapat dioperasikan secara ideal dan optimal. Pemanfaatan SIGAP sebagai sistem informasi berbasis digital dapat membantu mempercepat proses pelayanan serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan yang dibutuhkan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, kondisi saat ini menunjukkan bahwa aplikasi SIGAP belum berjalan secara optimal. Hal tersebut

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Sekretaris kecamatan Darussalam, Bapak Masri Fithrian, ST. M.Si dikantor camat Darussalam pada tanggal 21 Juli 2026

menyebabkan manfaat SIGAP dalam menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi pelayanan belum dapat dirasakan secara maksimal

Dalam pengimplementasian aplikasi SIGAP ini tentu saja ada kendala dalam hal apapun. Peneliti menemukan hasil temuan bahwasanya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efisiensi penggunaan SIGAP di pemerintahan gampong. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan dan mengelola SIGAP. Keterbatasan tersebut dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan aplikasi dalam mendukung proses pelayanan dan administrasi pemerintahan gampong. Selain itu, pemanfaatan SIGAP oleh masyarakat juga membutuhkan dorongan dan pendampingan dari aparat pemerintah gampong. Aparatur pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan informasi, mengarahkan, dan mendorong masyarakat agar terbiasa memanfaatkan SIGAP dalam memperoleh informasi maupun layanan yang tersedia. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi SIGAP tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan SDM aparat serta peran aktif pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut.

4.3.5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep yang mengacu pada kewajiban untuk memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas kinerja dan perilaku individu, kelompok, atau organisasi kepada pihak yang memiliki otoritas atau pemberi mandat. Untuk melihat bagaimana SIGAP mendukung pertanggungjawaban pemerintah gampong kepada Masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan pemerintah kecamatan yaitu dengan sekretaris kecamatan Darussalam, beliau menyebutkan bahwa;

“Jadi kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban dalam SIGAP, ini kalau ditingkat gampong biasanya ini urusan operator, dan untuk di tingkat kecamatan ini urusan kasi pemerintahan. Menurut saya dengan adanya SIGAP ini sangat jelas operator atau siapapun yang meng-handle pasti akan terlatih pertanggungjawaban melalui SIGAP ini.”⁵¹

Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengoperasian SIGAP sepenuhnya berada pada operator yang telah ditunjuk oleh pemerintah gampong atau kecamatan. Operator memiliki peran penting dalam mengelola data, memperbarui informasi dan data, serta memastikan penggunaan SIGAP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya SIGAP, operator juga dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengoperasikan sistem sehingga proses pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SIGAP dapat mendukung penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi dan pelayanan pemerintahan gampong, karena setiap pengelolaan informasi dilakukan oleh operator yang memiliki tanggung jawab terhadap sistem. Kompetensi operator menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan SIGAP yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam wawancara tersebut peneliti tidak lupa menanyakan sejauh mana data dan laporan dalam SIGAP dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Beliau menjelaskan bahwasanya

“Untuk melihat sejauh mana data dan laporan dalam SIGAP ini akurat atau tidak, itu tidak bisa kita bilang akurat juga, karena seperti yang kita bilang sebelumnya, secara keseluruhan bahwa banyak data-data yang masih kosong, namun untuk data yang terisi sekarang itu dapat kita pastikan tepat.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara terkait akuntabilitas dalam Sistem Informasi Gampong (SIGAP), khususnya mengenai sejauh mana data dan laporan yang tersedia dapat

⁵¹ Hasil wawancara dengan Sekretaris kecamatan Darussalam, Bapak Masri Fithrian, ST. M.Si dikantor camat Darussalam pada tanggal 21 Juli 2026

⁵² Hasil wawancara dengan Sekretaris kecamatan Darussalam, Bapak Masri Fithrian, ST. M.Si dikantor camat Darussalam pada tanggal 21 Juli 2026

dipertanggungjawabkan keakuratannya, diketahui bahwa data yang terdapat dalam SIGAP saat ini masih belum sepenuhnya lengkap. Meskipun demikian, dalam proses penginputan dan pengelolaan data, pihak yang bertanggung jawab telah berupaya melakukan pemeriksaan dan pengolahan data secara teliti untuk meminimalkan terjadinya kesalahan. Ketelitian tersebut dilakukan agar data dan informasi yang disajikan dalam SIGAP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dengan demikian, dari aspek keakuratan, terdapat upaya untuk menjaga kebenaran data, meskipun dari aspek kelengkapan masih diperlukan penyempurnaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas data dalam SIGAP telah diupayakan melalui proses pengelolaan yang teliti, namun masih perlu didukung dengan peningkatan kelengkapan dan pembaruan data secara berkala agar informasi yang tersedia semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.3.6. Visi Strategis

Visi Strategis adalah suatu konsep menyeluruh yang menjelaskan arah jangka panjang dan tujuan dari sebuah organisasi, serta cara untuk mencapainya. Ini berfungsi sebagai pedoman utama yang memberikan orientasi strategis dan juga mendorong organisasi dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk merealisasikan visi tersebut, untuk meninjau bagaimana perencanaan pengembangan SIGAP dalam mendukung pembangunan gampong ke depan, peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris kecamatan Darussalam. Sekretaris kecamatan menegaskan bahwasanya;

“Seperti yang kita lihat SIGAP di Darussalam ini dikarenakan masih dalam tahap penyempurnaan, maka perencanaan pembangunan kedepannya belum kami simpulkan atau kami koordinasikan melalui aplikasi SIGAP ini.”⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Sekretaris kecamatan Darussalam, Bapak Masri Fithrian, ST. M.Si di kantor Camat Darussalam pada tanggal 21 Juli 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait visi strategis dalam pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), khususnya mengenai perencanaan pengembangan SIGAP dalam mendukung pembangunan gampong ke depan, diketahui bahwa pemanfaatan SIGAP saat ini masih berada pada tahap penyempurnaan. Kondisi tersebut menyebabkan perencanaan pembangunan gampong untuk ke depannya belum sepenuhnya dibahas atau direncanakan melalui aplikasi SIGAP. Pada tahap ini, pemerintah masih berfokus pada penyempurnaan sistem dan kelengkapan data yang tersedia dalam SIGAP agar aplikasi dapat berfungsi secara optimal. Dengan demikian, meskipun SIGAP memiliki potensi untuk menjadi sarana pendukung perencanaan dan pembangunan gampong di masa mendatang, fungsi tersebut belum sepenuhnya terlaksana pada saat penelitian dilakukan. Setelah proses penyempurnaan selesai dan SIGAP dapat berjalan secara optimal, diharapkan aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu media yang mendukung perencanaan pembangunan gampong secara lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk melihat sejauh mana SIGAP mendukung tercapainya tujuan strategis pemerintahan, peneliti juga menanyakan hal tersebut dengan sekretaris kecamatan Darussalam dimana beliau menjelaskan bahwa;

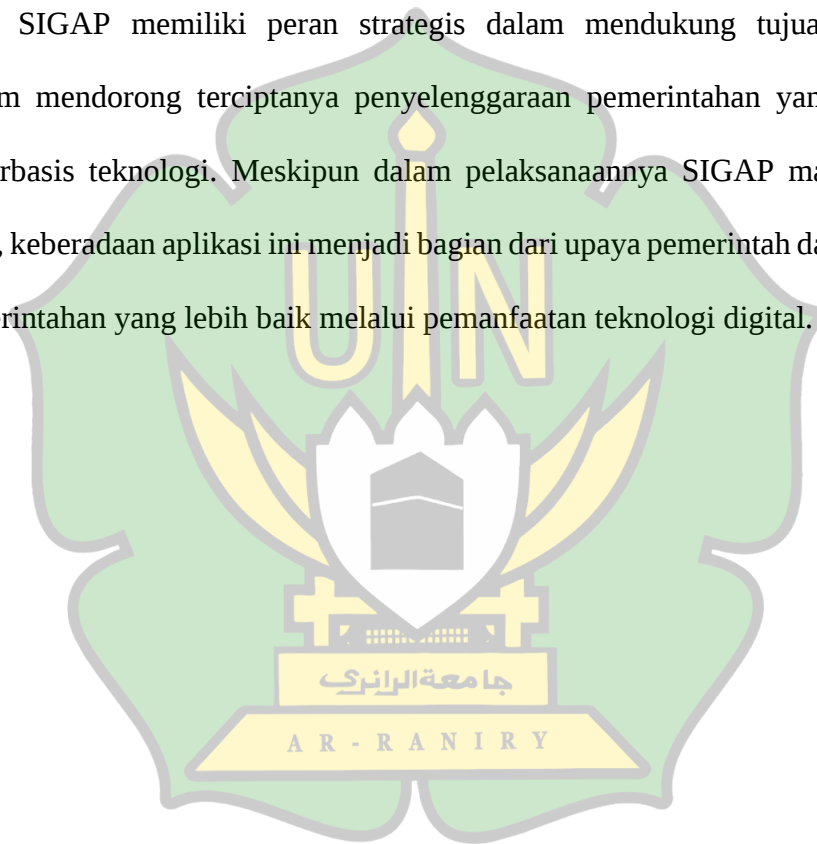
“Sudah pasti ini sangat mendukung dan sangat berguna di sektor pemerintahan, karena dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah para aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan maupun gampong dalam hal penyediaan layanan ataupun informasi, dan SIGAP ini dari penyempurnaan sebuah pemerintahan melalui teknologi digital.”⁵⁴

Bersumber pada hasil wawancara terkait visi strategis dalam pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), khususnya mengenai sejauh mana SIGAP mendukung tercapainya tujuan strategis pemerintahan, diketahui bahwa keberadaan aplikasi SIGAP dinilai sangat mendukung

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Sekretaris kecamatan Darussalam, Bapak Masri Fithrian, ST. M.Si di kantor Camat Darussalam pada tanggal 21 Juli 2026

proses penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan. SIGAP merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan serta menyesuaikan proses penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan teknologi. Pemanfaatan SIGAP juga menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk melakukan transformasi dari sistem pelayanan dan pengelolaan informasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menuju sistem berbasis digital.

Keberadaan SIGAP memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pemerintahan, khususnya dalam mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih modern, terbuka, dan berbasis teknologi. Meskipun dalam pelaksanaannya SIGAP masih memerlukan penyempurnaan, keberadaan aplikasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi digital.



4.4. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dalam mendukung pengelolaan pemerintahan di Kecamatan Darussalam, terlihat bahwa penerapan SIGAP telah membawa perubahan pada cara pengelolaan informasi dan pelayanan publik, meskipun implementasinya belum sepenuhnya maksimal. Sekretaris Kecamatan Darussalam menjelaskan bahwa: aparaturnya pemerintahan telah menggunakan SIGAP sebagai alat untuk mengelola data dan informasi gampong. Namun demikian, penggunaan aplikasi ini masih mengalami beberapa tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, keutuhan data, akses masyarakat yang terbatas, serta pelayanan yang masih berlangsung secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa SIGAP masih dalam tahap pengembangan untuk dapat dioptimalkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Mengacu dari hasil penelitian mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan Kecamatan Darussalam, dapat diketahui bahwa keberadaan SIGAP telah memberikan arah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi digital. Penelitian ini menggunakan prinsip *good governance* sebagai dasar analisis yang meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

1. Partisipasi Masyarakat

Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan SIGAP di Kecamatan Darussalam masih cukup minim. Masyarakat belum aktif memanfaatkan SIGAP sebagai alat untuk mendapatkan informasi mengenai gampong, mengungkapkan keinginan, atau

melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan perkembangan gampong. Penggunaan SIGAP masih didominasi oleh aparat gampong, khususnya oleh petugas yang diberi tanggung jawab untuk mengelola sistem tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan SIGAP belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Keterbatasan partisipasi masyarakat bukan hanya diakibatkan oleh rendahnya penggunaan aplikasi, tetapi juga berkaitan dengan minimnya pembaruan data yang ada di SIGAP. Masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan SIGAP jika informasi yang tersedia mencerminkan keadaan gampong secara akurat. Data warga, aktivitas pemerintahan, dan informasi pembangunan yang lengkap dan diperbarui secara berkala akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Sebaliknya, data yang tidak lengkap atau tidak diperbarui bisa membuat masyarakat kurang berminat menggunakan SIGAP sebagai sumber informasi.

Keterbatasan partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh akses langsung ke aplikasi. Menurut wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Darussalam, SIGAP sebenarnya memiliki potensi untuk membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan memenuhi kebutuhan pelayanan. Namun, akses masyarakat ke aplikasi masih dibatasi karena SIGAP lebih banyak diakses oleh perangkat gampong. Pemerintah berupaya mencegah potensi penyalahgunaan aplikasi dan penginputan informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme akses yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan SIGAP sambil tetap berada dalam pengawasan pemerintah gampong.

Dengan cara ini, dapat disimpulkan bahwa aspek partisipasi masyarakat dalam penggunaan SIGAP belum berjalan dengan baik. Meskipun SIGAP telah ada sebagai sarana digital pemerintahan, keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan sistem ini masih sangat rendah.

Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan SIGAP tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi namun juga oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan sosialisasi, meningkatkan literasi digital masyarakat, memperbarui database, serta menyediakan akses yang aman bagi masyarakat.

2. Transparansi

Hasil riset mengindikasikan bahwa SIGAP mempunyai potensi besar untuk mendukung keterbukaan informasi di pemerintahan gampong. Dengan menggunakan SIGAP, informasi serta data tentang gampong dapat dikumpulkan dalam satu sistem digital, sehingga lebih mudah dikelola oleh pihak pemerintah. Namun, dalam praktiknya, transparansi informasi melalui SIGAP masih menghadapi kendala karena akses pada aplikasi ini lebih banyak diberikan kepada operator atau perangkat gampong. Hal ini membuat masyarakat belum sepenuhnya mampu mengakses informasi secara langsung melalui sistem tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Darussalam, secara struktur SIGAP telah menyediakan beragam menu yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung transparansi informasi. Namun, masyarakat masih memerlukan keterlibatan operator gampong untuk mendapatkan akses. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara informasi yang tersedia dalam sistem dengan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tersebut. Dengan kata lain, transparansi dalam sistem telah ada, tetapi generasi yang praktis belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat akibat keterbatasan akses.

Selain isu akses, kelengkapan data juga merupakan faktor yang mempengaruhi transparansi SIGAP. Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa masyarakat sebenarnya dapat melihat menu yang ada di SIGAP, namun tidak semua informasi dapat ditampilkan karena masih ada data yang belum terisi. Ini menunjukkan bahwa terbukanya informasi tidak hanya bergantung pada

ketersediaan menu dalam aplikasi, tetapi juga pada kelengkapan serta pembaruan data yang dilakukan oleh pegawai gampong.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi melalui SIGAP masih dalam proses pengembangan. Jika data yang tersedia semakin lengkap, akurat, dan diperbarui secara teratur, maka masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai kondisi dan penyelenggaraan pemerintahan gampong. Oleh karena itu, SIGAP memiliki potensi untuk memperkuat transparansi pemerintahan, tetapi perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan data serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

3. Responsivitas

Temuan penelitian tentang responsivitas menampilkan bahwa penggunaan SIGAP belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan cepatnya dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan pengoperasian SIGAP. Keterbatasan ini mengakibatkan sebagian layanan masyarakat masih dilakukan secara manual di kantor gampong. Dengan demikian, keberadaan SIGAP sebagai sistem pelayanan digital belum sepenuhnya menggantikan proses pelayanan yang dilakukan secara langsung.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa SIGAP sebenarnya memiliki potensi untuk menyederhanakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Jika sistem dapat berjalan dengan baik, masyarakat bisa mendapatkan informasi dan mengajukan kebutuhan pelayanan melalui sistem tanpa harus selalu hadir secara langsung di kantor pemerintahan. Sayangnya, manfaat tersebut masih belum sepenuhnya dirasakan karena penggunaan SIGAP dalam pelayanan masih berada di tahap pengembangan.

Dalam kondisi ini, SIGAP belum bisa dikatakan telah secara pasti meningkatkan kualitas pelayanan dengan signifikan. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pelayanan manual dan keterbatasan dalam pengoperasian sistem. Meskipun demikian, proses pemanfaatan SIGAP menunjukkan adanya kemajuan menuju pelayanan yang lebih responsif. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas pegawai, peningkatan sistem, serta kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan digital sangat penting untuk mengoptimalkan responsivitas SIGAP.

4. Efektivitas dan Efisiensi

Penggunaan aplikasi SIGAP dalam tata kelola pemerintahan gampong pada dasarnya telah selaras dengan arah pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan keterangan Sekretaris Kecamatan Darussalam, belum ditemukan indikasi penyalahgunaan sistem, yang menandakan bahwa platform ini telah difungsikan sesuai peruntukannya. Kendati demikian, tingkat efektivitas pelayanan publik masih terbatas lantaran sebagian besar proses administrasi tetap dijalankan secara manual.

Dari segi efisiensi, SIGAP berpotensi mempercepat proses serta menghemat sumber daya melalui pengorganisasian data yang lebih rapi. Walau demikian, manfaat ini belum teroptimalkan mengingat aplikasi belum diimplementasikan secara penuh dalam alur pelayanan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan teknologi semata tidak serta-merta menjamin efisiensi tanpa kesiapan aparatur dan penerapan sistem secara komprehensif.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi penghambat utama optimalisasi SIGAP. Aparatur tidak hanya dituntut mahir mengoperasikan dan memperbarui data, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasi kepada publik. Di sisi lain, masyarakat memerlukan edukasi agar terbiasa memanfaatkan layanan digital ini. Oleh sebab itu, pengembangan SIGAP perlu diselaraskan dengan peningkatan kompetensi aparatur serta pendampingan bagi warga.

5. Akuntabilitas

Penerapan SIGAP turut mendorong prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan data dan informasi pemerintahan gampong. Penunjukan operator khusus di tingkat gampong serta penanggung jawab di tingkat kecamatan memperjelas pembagian peran dalam penginputan, pemeliharaan, hingga pembaruan data secara berjenjang.

Aspek akuntabilitas ini juga bergantung pada keandalan informasi yang disajikan. Meski data yang telah terunggah relatif akurat, tingkat kelengkapannya masih tergolong rendah. Permasalahan utama tidak lagi berfokus pada validitas data semata, melainkan pada pemenuhan kelengkapan informasi sistem. Pengelolaan secara berkesinambungan amat diperlukan agar basis data yang ada benar-benar merepresentasikan kondisi terkini di lapangan.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban dalam tata kelola SIGAP mulai terbangun lewat kejelasan pembagian tugas. Namun, penguatannya tetap memerlukan pembaruan berkala, verifikasi data, dan penataan basis data yang lebih menyeluruh. Kelengkapan serta pemutakhiran data yang berkelanjutan akan memperkuat akuntabilitas pemerintah gampong kepada public

6. Visi Strategis

SIGAP dipandang sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi digital di lingkup gampong. Namun, saat riset berlangsung, pengembangannya di Kecamatan Darussalam masih berada pada tahap penyempurnaan. Dampaknya, sistem ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen perencanaan pembangunan gampong, sebagaimana dikonfirmasi oleh Sekretaris Kecamatan Darussalam.

Kendati integrasinya dalam perencanaan belum menyeluruh, SIGAP tetap memiliki nilai strategis dalam menunjang tata kelola pemerintahan. Sistem ini membantu aparaturnya kecamatan dan

gampong menyediakan data serta layanan publik secara terpadu, sekaligus mencerminkan transisi menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital yang modern.

Secara umum, SIGAP di Kecamatan Darussalam telah berkontribusi bagi percepatan digitalisasi tata kelola data gampong. Meski demikian, penyempurnaan masih diperlukan untuk mengatasi hambatan terkait partisipasi warga, keterbatasan akses, responsivitas layanan, kompetensi SDM, serta pemanfaatan data untuk perencanaan jangka panjang. Penguatan pada berbagai aspek ini penting agar implementasi SIGAP benar-benar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan responsif.

4.5. Faktor Kendala Dari Pemanfaatan SIGAP Dan Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Gampong.

Berikut adalah penjelasan apa saja yang menjadi faktor kendala dalam pemanfaatan SIGAP di Kecamatan Darussalam.

1. Pembatasan Hak Akses Aplikasi bagi Masyarakat

"Aplikasi SIGAP sebenarnya akan sangat membantu apabila warga dapat mengaksesnya lebih jauh. Namun, perangkat gampong khawatir terjadi penyalahgunaan aplikasi oleh warga jika diberikan akses langsung. Oleh sebab itu, pemanfaatan SIGAP belum maksimal dan perlu akun khusus bagi masyarakat."

Pernyataan menunjukan bahwa akses terhadap aplikasi SIGAP saat ini dibatasi secara ketat hanya untuk perangkat gampong (*login admin*). Alasan utamanya adalah kekhawatiran aparat terhadap risiko keamanan data dan potensi penginputan informasi yang tidak terverifikasi jika sistem dibuka secara bebas. Pengaruh terhadap Pelayanan: Pembatasan akses ini menghambat terwujudnya transparansi dan partisipasi publik. Warga tidak dapat menyampaikan aspirasi, memantau program pembangunan, maupun mengajukan permohonan layanan secara mandiri dari rumah. Akibatnya, fungsi SIGAP bergeser hanya sebagai alat administrasi internal pemerintahan gampong, bukan sebagai media pelayanan publik berbasis digital.

2. Keterbatasan Jumlah dan Kualitas SDM Pengelola

"Sumber daya manusia yang mengelola SIGAP masih sangat terbatas. Selain itu, aksesnya terbatas pada perangkat desa dan pelayanan harian masih dijalankan secara manual di kantor desa. Pemanfaatan SIGAP ini belum optimal, tetapi sedang berproses menuju ke sana."

Temuan ini menjelaskan masih terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat gampong, baik dari segi ketersediaan jumlah operator maupun pemahaman teknis dalam mengoperasikan dan mengelola aplikasi SIGAP secara berkelanjutan.

Pengaruh terhadap Pelayanan, Keterbatasan SDM membuat perangkat gampong memilih untuk tetap menggunakan prosedur pelayanan secara konvensional (*manual*). Hal ini menyebabkan responsivitas pelayanan terhambat proses pengurusan dokumen administrasi tidak dapat dipangkas secara efisien dan pemanfaatan sistem digital belum mampu memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang signifikan bagi masyarakat.

3. Ketidaklengkapan dan Belum Pembaruan Data (Database).

"Warga sebetulnya bisa melihat seluruh menu yang ada pada SIGAP, namun datanya masih banyak yang belum terisi. Jadi, masyarakat hanya dapat mengakses menu-menu yang datanya sudah diinput."

Sekretaris camat juga menjelaskan:

"Mengenai tingkat keakuratan data dan laporan pada SIGAP, kami tidak bisa menjamin sepenuhnya akurat karena masih banyak data yang kosong. Namun, untuk data yang sudah terinput, dapat dipastikan validitasnya."

Dalam hal ini masih banyaknya kolom data kependudukan, program kegiatan, dan basis data gampong lainnya dalam SIGAP yang belum terisi lengkap maupun diperbarui (*up-to-date*) secara berkala. Ketidaklengkapan data mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keandalan informasi pada aplikasi SIGAP. Kondisi ini berdampak pada keengganan warga untuk

menggunakan aplikasi sebagai acuan informasi administrasi, sehingga masyarakat lebih memilih datang langsung ke kantor desa untuk memastikan kebenaran informasi.

4. Rendahnya Sosialisasi dan Literasi Digital Masyarakat

"Mengenai ketepatan penggunaan SIGAP, sejauh ini sudah tepat karena belum ada temuan penyalahgunaan aplikasi di Darussalam. Meski demikian, pelayanan administrasi gampong pada praktiknya masih mengandalkan cara-cara manual."

Temuan Tersebut menunjukkan bahwa minimnya kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan mengenai cara penggunaan serta manfaat SIGAP kepada masyarakat luas. Hal ini diperparah oleh tingkat literasi digital warga yang masih lambat dan budaya masyarakat yang masih terbiasa bergantung pada interaksi langsung dengan aparat gampong. Tidak terbangunnya kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk urusan administrasi. Akibatnya, potensi SIGAP untuk menghemat waktu dan biaya pelayanan menjadi tidak tercapai secara optimal, dan proses pelayanan tetap berjalan dengan cara-cara lama yang kurang efisien.

5. Belum Optimalnya Sistem dalam Perencanaan Pembangunan Strategis

"Meningkat aplikasi SIGAP di Kecamatan Darussalam masih dalam tahap penyempurnaan, maka perencanaan pembangunan ke depan belum disimpulkan atau dikoordinasikan melalui sistem ini."

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa: Penerapan SIGAP masih berfokus pada tahap pembenahan teknis dan penyempurnaan data internal, sehingga belum diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan maupun perencanaan pembangunan gampong jangka panjang.

Sehingga berpengaruh terhadap Pelayanan Kualitas tata kelola dan perencanaan pelayanan belum didasarkan pada analisis data digital yang riil (*data-driven decision making*). Keputusan

terkait program pelayanan publik masih diambil secara konvensional, sehingga kurang sensitif dan responsif terhadap kebutuhan strategis masyarakat gampong secara cepat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tata Kelola Sistem Informasi Gampong (Sigap) Dalam Pemerintahan Di Kecamatan Darussalam, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan SIGAP telah memberikan perubahan positif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi digital. SIGAP dapat membantu aparatur dalam mengelola data dan informasi gampong serta memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya SIGAP di Kecamatan Darussalam masih belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam pemanfaatannya.

Dilihat dari aspek partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan SIGAP masih rendah. Penggunaan SIGAP masih lebih banyak dilakukan oleh aparatur gampong, sedangkan masyarakat belum aktif menggunakan sistem tersebut untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, maupun melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan pembangunan gampong. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap aplikasi.

Dari aspek transparansi, SIGAP sebenarnya memiliki kemampuan untuk mendukung keterbukaan informasi pemerintahan. Akan tetapi, transparansi tersebut belum berjalan secara maksimal karena akses terhadap SIGAP masih didominasi oleh aparatur gampong. Masyarakat belum dapat mengakses informasi SIGAP secara langsung secara optimal dan fitur informasi publik yang tersedia belum dimanfaatkan atau disebarluaskan dengan baik.

Dari aspek responsivitas, SIGAP memiliki potensi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelayanan administrasi di Kecamatan Darussalam dan

gampong-gampong yang menjadi objek penelitian masih banyak dilakukan secara manual. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan melalui SIGAP belum dapat dikatakan maksimal dan masih membutuhkan proses penyempurnaan serta pengembangan secara berkelanjutan.

Dari aspek efektivitas dan efisiensi, keberadaan SIGAP pada dasarnya dapat menghemat waktu, tenaga, dan mempermudah pengelolaan informasi apabila digunakan secara optimal. Akan tetapi, pemanfaatannya belum sepenuhnya efektif dan efisien karena sebagian proses administrasi masih dilakukan secara manual. Selain itu, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan SIGAP juga menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi sistem.

Dari segi akuntabilitas, SIGAP dapat mendukung proses pertanggungjawaban pemerintahan melalui pengelolaan data dan informasi secara digital. Keberadaan sistem ini dapat membantu aparaturnya dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan data pemerintahan. Namun, manfaat tersebut akan lebih maksimal apabila data yang terdapat dalam SIGAP selalu diperbarui dan dikelola secara konsisten oleh aparaturnya yang bertanggung jawab.

Sementara itu, dilihat dari aspek visi strategis, SIGAP telah memiliki peran yang penting dalam mendukung arah pengembangan pemerintahan Kecamatan Darussalam menuju pemerintahan yang lebih modern dan berbasis teknologi. Pemerintah Kecamatan Darussalam menilai SIGAP dapat membantu aparaturnya dalam penyediaan informasi dan pelayanan serta menjadi bagian dari upaya penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan melalui teknologi digital.

Dengan demikian, secara keseluruhan implementasi SIGAP di Kecamatan Darussalam telah memberikan dasar yang baik bagi pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital, tetapi belum sepenuhnya mencapai kondisi yang optimal. Permasalahan utama yang masih perlu diperhatikan adalah rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akses informasi publik,

kemampuan sumber daya manusia yang belum merata, pelayanan yang masih dilakukan secara manual, serta perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah Kecamatan Darussalam bersama pemerintah gampong untuk terus melakukan pengembangan dan optimalisasi SIGAP agar dapat benar-benar mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kecamatan Darussalam agar meningkatkan peran kecamatan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kepada pemerintah gampong dalam pemanfaatan SIGAP. Pemerintah Kecamatan Darussalam perlu memastikan bahwa setiap gampong mampu menggunakan SIGAP secara konsisten dan sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintahan. Hal ini penting karena SIGAP masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, keutuhan data, akses masyarakat, serta pelayanan yang masih dilakukan secara manual.

Pemerintah Kecamatan Darussalam juga disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi, manfaat, dan cara menggunakan SIGAP. Sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada aparat gampong, tetapi juga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan partisipasi masyarakat dalam memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkat.

Selanjutnya, Pemerintah Kecamatan Darussalam perlu mendorong peningkatan keterbukaan informasi melalui SIGAP. Informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat

hendaknya diperbarui secara berkala dan dapat diakses dengan mudah. Pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme akses masyarakat yang tetap memperhatikan keamanan dan validitas data, sehingga kekhawatiran terhadap penyalahgunaan sistem dapat diminimalkan. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan partisipasi publik dalam SIGAP masih rendah.

Pemerintah Kecamatan Darussalam juga disarankan untuk meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pendampingan SIGAP secara berkala. Pelatihan perlu diberikan tidak hanya pada operator, tetapi juga kepada aparatur lain yang berkaitan dengan pengelolaan data dan pelayanan administrasi. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia penting agar SIGAP tidak hanya menjadi sistem penyimpanan informasi, tetapi benar-benar digunakan sebagai sarana pelayanan dan pengelolaan pemerintahan secara digital.

Selain itu, Pemerintah Kecamatan Darussalam perlu mendorong agar pelayanan administrasi yang masih dilakukan secara manual secara bertahap dapat diintegrasikan ke dalam SIGAP. Dengan demikian, penggunaan SIGAP tidak hanya terbatas pada pengelolaan data, tetapi juga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa sebagian besar pelayanan administrasi masih dilakukan secara manual sehingga manfaat SIGAP belum dirasakan secara maksimal.

Terakhir, Pemerintah Kecamatan Darussalam perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SIGAP dengan melibatkan pemerintah gampong dan masyarakat. Evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kendala yang muncul, memperbaiki kekurangan sistem, memperbarui data, serta menyesuaikan pemanfaatan SIGAP dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan, SIGAP diharapkan

dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan Kecamatan Darussalam yang transparan, akuntabel, responsif, efektif, dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- . Akhmad. “Analisa Komprehensif Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Ad’ministrare* 3, no. 2 (2021): 31. <https://doi.org/10.26858/ja.v3i2.2425>.
- Abubakar, Rifa’i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Vol. 1, 2021.
- Aceh, Pemerintah. “Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu,” 2020.
- Aceh, Pemkab, and Besar. “Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar.” *Kecamatan Baitussalam Dalam Angka*, 2021.
- Arhami, Muhammad, Rachel Ardana Putra Ginting, Sahuddin, and Isnani. “Disain Dan Implementasi Aplikasi Chatbot Gampong Carong.” *EProceeding of TIK* 4, no. 1 (2024): 4–9.
- BPS, and Aceh Besar. “BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH BESAR BPS-Statistics Aceh Besar Regency,” 2024.
- Dhirtya, Desak Ayu Made Citta, and I Gede Ketut Warmika. “Analisis Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong (Dpmg) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong.” *Tjyybjb.Ac.Cn* 27, no. 2 (2019): 58–66.
- Emi Riza, Wardana, Dicky Ariesandi, Zainal Mahyar, Sudarman Puteh. “Panduan Penggunaan Sistem Informasi Gampong,” 2021, 1–50.
- Engkus, Ainyna Rachmadianty Azan, and Anisa Tiara Fitri, Alliadar Hanif. “Buku Mewujudkan GG Melalui Pelayanan Publik.” *Dialektika* 19, no. 1 (2021): 1–361.
- Gampong, Sistem Informasi. “Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Versi 1.7.5 2020,” 2020.
- Gampong, Sistem Informasi, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran, Negara Republik, and Indonesia Nomor. “Gubernur Aceh,” 2021, 2–10.
- Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, and George Ramos. “Urgensi Penerapan Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Baik (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan) *The Urgence Of Implementation Of Good Governance In Achieving Quality Of Good Public*

Service,” n.d.

- Hanifa, Dina, Mumtazah, Nia Shinta, and Taufik. “Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Pada Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.” *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 48–60. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v4i1.3723>.
- Hasdinawati, and Abd. wahid. “Responsivitas Pelayanan Publik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, no. 2 (2022): 81–96. <https://doi.org/10.59050/jian.v19i2.158>.
- Helmi, Sufri, Noer Fadhly, and Yusria Darma. “Bangkitan Perjalanan Rumah Tangga Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.” *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan* 2, no. 1 (2019): 68–77. <https://doi.org/10.24815/jarsp.v2i1.13206>.
- Heryanto Monoarfa. “Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan.” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2021): 1–9.
- Iii, B A B. “8. Bab Iii_2018309Kom,” 2021, 27–33.
- Inadjo, Inayah Mawaddah, Benedicta J Moku, and Nicolaas Kandowanko. “Definisi Data Primer.” *Journal Ilmiah Society* 3, no. 1 (2023): 1–7.
- Kusmulyono, M Setiawan, and Teguh Endaryono. “Kekuatan Visi Misi Dalam Memandu Arah Strategis UMKM Lebon.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat PKN STAN* 01 (20): 138–43.
- Maryam, Neneng. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VI, no. 1 (20): 1–18.
- Muh Fikri Haikal, and Deasy Mauliana. “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Makassar).” *Jurnal Administrasi Negara* 28, no. April (2022): 89–112.
- Munandar, Aris, Jln Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Jln Jawa, et al. “Pembentukan Qanun Gampong Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong (Studi Kasus Gampong Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara)” 8, no. 2 (2025).
- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,” 2021, 45. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77921/pp-no-17-tahun-2018>.

- Rachmawati, Imami Nur. "Jurnal Tentang Wawancara Di Metode Penelitian Kualitatif Derskriptif Yg Valid." *Indonesian Journal of Nursing* 11, no. 1 (2007): 35–40.
- Rafik, Rafik, Khairul Umami, Silva Aulia Salsabila, Widya Afiliani, Alifa Zairinadya, Yenni Yenni, Wira Santia, Siti Aminah, and Aswin Nasution. "Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa Berbasis Web Untuk Meningkatkan Manajemen Administrasi Desa (Studi Kasus: Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara)." *Teknodimas: Teknologi Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 5–13.
- Rahmawati, Noer Bunka, and Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng. "Peran Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis." *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 313–23. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302>.
- Razali, Safrizal, Yuwaldi Away, Maimun Maimun, Aulia Rahman, Muslimsyah Muslimsyah, Yudha Nurdin, and Al Bahri. "Penerapan Sistem Informasi Desa E-Gampong Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik." *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)* 7, no. 3 (2023): 131–38.
- Samirah, Fathya, And Yenny Novianti. "Setting Fisik Dari Keberadaan Street Food Di Jalan Darussalam Kota" 1 (2025): 4–5.
- Sapmala Marbun, Kiki, Hasian Romadon Tanjung, and Anni Rahima. "Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah." *Pendidikanbahasadansastraindonesia* 1, no. 2 (2021): 2775–4693.
- Setyawan, Arief, Achluddin Ibnu Rochim, and Bambang Kusbadrijo. "Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, no. 05 (2022): 42–51.
- Setyono, Joko. "(Pendekatan Ushul Fikih : Teori Peningkatan Norma)." *Journal Of Islamic Economics and Banking* 6, no. 1 (2021): 25–40.
- Sugiyono. "Penegertian Observasi" 28, no. 2 (2020): 16.
- Suparji, Suparji. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756>.
- Syahputra, Dedy, Faisal A. Rani, and Mohd. Daud Yoesoef. "Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Jurnal*

- Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 29.
- Tripathi, Rahul. "Good Governance: Origin, Importance and Development in India." *International Journal of Development Research* 07, no. 11 (2021): 16968–70.
- Ula, Mutammimul, Zahratul Fitri, Fakhurrrazi Fakhurrrazi, Zul Akli, Zainal Abidin, and Mochamad Ari Saptari. "PKM Pelatihan Dan Pendampingan Sistem Informasi Administrasi Dan Web Mobile Untuk Aparatur Gampong Uteunkot Kota Lhokseumawe." *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* 3, no. 2 (2024): 460–71.
- Weiss, Thomas G. "Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges." *International Organization* 21, no. 5 (2021): 389–408. <https://doi.org/10.4324/9781315251981-14>.
- Wilda, Raihan, Marliana, and Abid rifaldi. "Pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (Sigap) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Gampong Ulee Tuy." *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 40–46. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v4i2.3784>.
- Zahra, Hanifa, Seno Santoso, and Irvan Arif Kurniawan. "Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi Simpel TKR PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan* 7, no. September (2024): 87–98.
- Deskripsi Mendalam Untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif." *Sports Culture* 15, no. 1 (2024): 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>.
- "Penerapan Sistem Informasi Gampong Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh," 2024.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3109/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **06 November 2025**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Reza Idris, S.H.I., M.A., Ph.D.** Sebagai pembimbing I
2. **Arif Akbar, M.A.** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : **Saidil Akbar**
- NIM : **220802087**
- Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
- Judul : **Analisi Implementasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dalam Penataan Pemerintahan di Kecamatan Darussalam**
- KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1281/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/07/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kantor Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar; Lembaga DPMG Aceh
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802087

Nama : SAIDIL AKBAR

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jln.lancok Laksamana Desa siren

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI GAMPONG (SIGAP) DALAM Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Darussalam**

Banda Aceh, 14 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 November 2026



Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Darussalam



Wawancara dengan staf TTG DPMG Aceh



Wawancara dengan geuchik gampong Tanjong Seulamat



Wawancara dengan geuchik gampong Lambaro Sukon



Wawancara dengan sekretaris gampong Miruk Taman



Wawancara dengan operator gampong Limpok